



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITI SUSU BUBUK INDONESIA 2014



**DISTRIBUSI PERDAGANGAN
KOMODITI SUSU BUBUK
INDONESIA 2014**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di 34 Provinsi Tahun 2014. Pemilihan komoditi yang diteliti didasarkan pada pertimbangan memiliki kontribusi output yang besar dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output* (I-O) 2005 dan bobot pada perhitungan inflasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2014 ditetapkan 4 komoditi yang diteliti yaitu susu bubuk, minyak goreng, garam, dan tepung terigu.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditi susu bubuk mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen. Informasi yang disajikan adalah peta distribusi perdagangan, pola distribusi perdagangan, dan margin perdagangan dan pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2014

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia,



Dr. Ir. SASMITO HADI WIBOWO, M.Sc.
NIP. 195608051979031001

<http://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen serta kurangnya ketersediaan barang kebutuhan yang tidak cukup pada saat dibutuhkan terutama di kota-kota besar mengakibatkan adanya pola distribusi komoditas yang masih bermasalah. Selain itu kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga), dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Publikasi ini menganalisa distribusi perdagangan dalam negeri komoditi susu bubuk di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 126 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola dan peta distribusi komoditi susu bubuk secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya fungsi usaha perdagangan di setiap provinsi mendapatkan pasokan susu bubuk dari wilayah kabupaten/kota di luar provinsi. Ketersediaan pasokan susu bubuk terpusat di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, utamanya DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Keywords: *Pola, Peta, Distribusi, Susu Bubuk, Marjin*

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Cakupan Komoditi	2
1.5 Cakupan Wilayah.....	2
1.6 Metodologi.....	2
BAB II ULASAN RINGKAS.....	5
2.1 Gambaran Umum	5
2.2 Sentra Produksi Susu Bubuk.....	5
2.3 Distribusi Perdagangan Susu Bubuk Nasional.....	7
2.4 Distribusi Perdagangan Susu Bubuk Perprovinsi.....	8
2.4.1 Provinsi Aceh.....	8
2.4.2 Provinsi Sumatera Utara	10
2.4.3 Provinsi Sumatera Barat.....	12
2.4.4 Provinsi Riau.....	14
2.4.5 Provinsi Jambi.....	16
2.4.6 Provinsi Sumatera Selatan	18
2.4.7 Provinsi Bengkulu.....	20
2.4.8 Provinsi Lampung.....	22
2.4.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	24
2.4.10 Provinsi Kepulauan Riau.....	26
2.4.11 Provinsi DKI Jakarta.....	28
2.4.12 Provinsi Jawa Barat	30
2.4.13 Provinsi Jawa Tengah	32
2.4.14 Provinsi D.I. Yogyakarta.....	34
2.4.15 Provinsi Jawa Timur.....	36
2.4.16 Provinsi Banten	38
2.4.17 Provinsi Bali.....	39

2.4.18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	41
2.4.19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	43
2.4.20	Provinsi Kalimantan Barat	45
2.4.21	Provinsi Kalimantan Tengah	48
2.4.22	Provinsi Kalimantan Selatan	50
2.4.23	Provinsi Kalimantan Timur	52
2.4.24	Provinsi Kalimantan Utara	54
2.4.25	Provinsi Sulawesi Utara	56
2.4.26	Provinsi Sulawesi Tengah	58
2.4.27	Provinsi Sulawesi Selatan	60
2.4.28	Provinsi Sulawesi Tenggara	62
2.4.29	Provinsi Gorontalo	64
2.4.30	Provinsi Sulawesi Barat	66
2.4.31	Provinsi Maluku	68
2.4.32	Provinsi Maluku Utara	70
2.4.33	Provinsi Papua Barat	72
2.4.34	Provinsi Papua	75
BAB III KESIMPULAN		77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya dan mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pola distribusi komoditi susu bubuk saat ini diduga masih bermasalah, hal ini terlihat dari adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Selain itu ketersediaan barang kebutuhan yang tidak cukup pada saat dibutuhkan dan kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antar produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga), dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Untuk mengetahui dimana letak permasalahan tersebut dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi. Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditi diantaranya susu bubuk. Kegiatan ini dilakukan karena hasilnya bisa digunakan untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan susu bubuk di dalam negeri dan dapat dibangun sistem distribusi perdagangan yang lebih baik.

Hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan 2014 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditi-komoditi terpilih dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survei selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2012 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2014 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- Mendapatkan Pola Penjualan Produksi.
- Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan.
- Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.
- Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

1.4 Cakupan Komoditi

Penentuan komoditi dalam survei ini adalah komoditi strategis, yaitu komoditi-komoditi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Komoditi yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- Komoditi yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
- Komoditi yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.
- Komoditi yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5 Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah survei meliputi 126 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan jumlah sampel sebanyak 578 perusahaan/usaha perdagangan dan produsen.

1.6 Metodologi

a. Cakupan KBLI Komoditi Susu bubuk

Tabel 1.1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Menurut Jenis Komoditi

Komoditi	KBLI 2009	KBLI 2005	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Susu Bubuk	10520	15201	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
	46326	51220 53220 54220	Perdagangan besar susu dan produk susu
	47111	52111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket
	47112	52112	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)

b. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen, kerangka sampel berasal dari SE06-UMB kategori D (industri) dan direktori industri skala besar dan sedang. Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari:

- a. SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Tahapan penggunaan data SE06-UMB adalah :

Menentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir, importir, dan pengecer dilakukan pendekatan berdasarkan hasil SE06-UMB kategori G, yang bersumber dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut penjualan barang). Sedangkan untuk perusahaan SE06-UMB yang *nonresponse*, tidak dapat dilakukan penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha.

**Tabel 1.2. Matriks Penentuan Fungsi Kelembagaan*)
dalam Perusahaan/Usaha Perdagangan UMB**

No.	Asal barang	Penjualan				
		Luar negeri	Produsen	Pedagang lainnya	Pemerintah /swasta	Rumah tangga/perorangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melalui Importir		1	1	1	8
2	Impor Sendiri		7	7	7	8
3	Produsen non pertanian	6	1	1	1	8
4	Distributor/penyalur/agen	6	2	4	4	8
5	Supermarket/swalayan	6	4	8	8	8
6	Pedagang lainnya	6	4	8	8	8

*) Kode fungsi kelembagaan:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Distributor | 6. Eksportir |
| 2. Subdistributor | 7. Importir |
| 3. Agen | 8. Pengecer |
| 4. Subagen | |
| 5. Pedagang Grosir | |

- b. Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
- c. Daftar nama perusahaan/usaha perdagangan eksportir.
- d. Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
- e. Sumber lain: berasal dari internet.

Pada survei ini terjadi non respon pada pencacahan perusahaan yang berfungsi sebagai produsen, sehingga publikasi ini menguraikan hasil survei pada perusahaan yang

berfungsi sebagai pedagang. Pencacahan perusahaan menggunakan pendekatan fungsi kelembagaan perusahaan dan komoditi yang diperdagangkan. Fungsi kelembagaan yang bersumber dari SE06-UMB merupakan *proxy*, sedangkan perusahaan dari sumber lain berdasarkan pengakuan responden.

c. Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan 4 komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

<http://www.bps.go.id>

BAB II ULASAN RINGKAS

2.1 Gambaran Umum

Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam kebutuhan sehari-hari, karena susu mengandung kelengkapan gizi yang penting bagi tubuh. Susu berperan sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, khususnya anak-anak. Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi susu, menjadikan susu sebagai komoditas ekonomi yang mempunyai nilai sangat strategis.

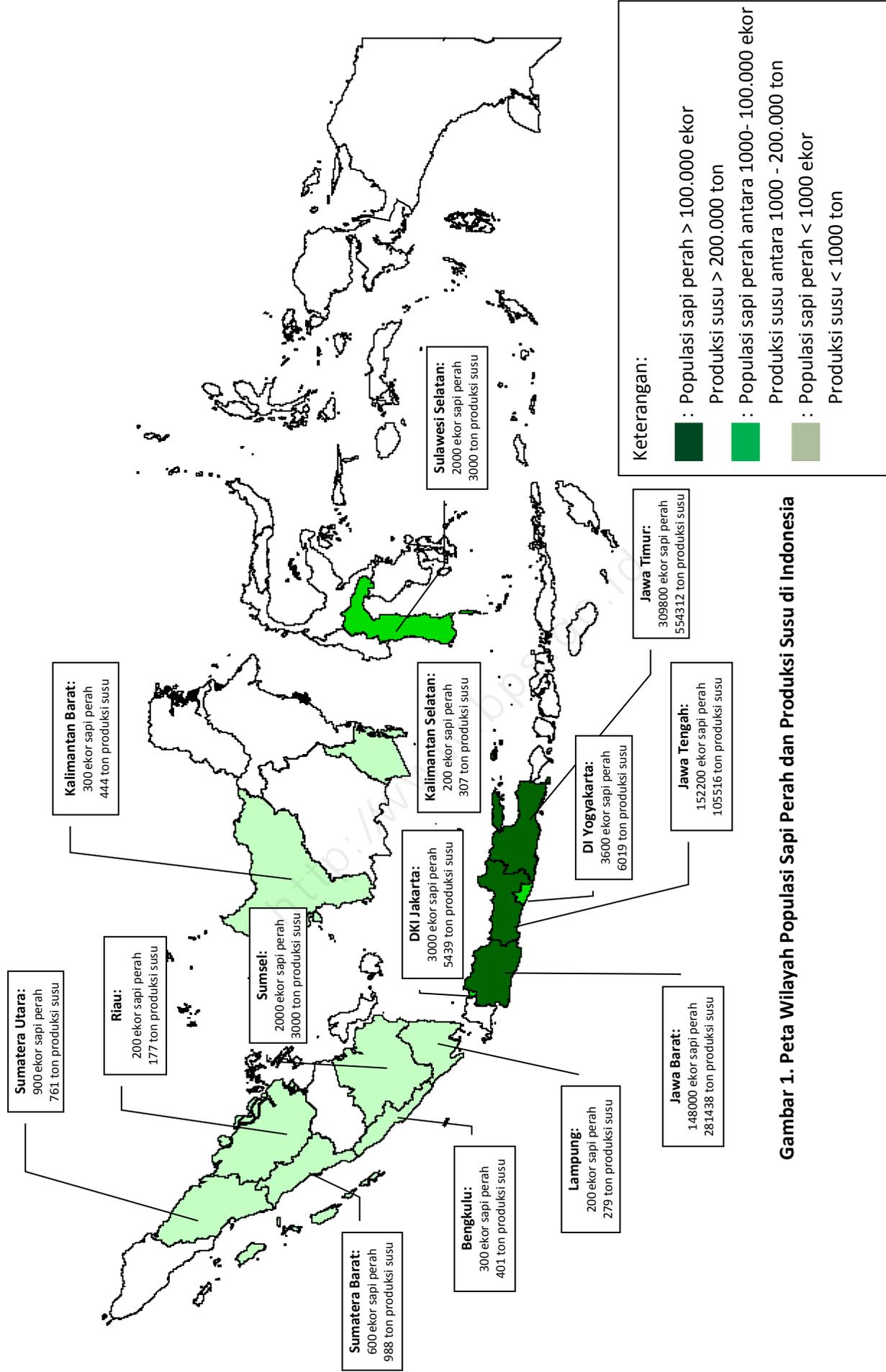
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, konsumsi susu bubuk di Indonesia pada tahun 2012 meningkat 5 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dibarengi dengan peningkatan produksi susu sapi sebesar 4,25 persen dan juga populasi sapi perah sebesar 4,20 persen. Akan tetapi peningkatan konsumsi susu lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produksi susu dan populasi sapi perah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan akan komoditas susu tersebut sehingga negara harus memenuhinya dengan mengimpor dari negara lain. Di satu sisi, import susu tersebut menguntungkan pihak konsumen karena akan memunculkan produk yang lebih bervariasi dengan harga yang juga bersaing.

Jenis-jenis susu yang tersedia di pasaran beragam seperti istilah *Full cream*, *Low fat*, *Skim*, susu evaporasi, susu Pasteur, *Flavoured*, *Calcium enriched*, *Ultra-High Temperature-Treated (UHT)* dan *Conjugated Linoleic Acid (CLA)*. Dari berbagai jenis susu yang telah dipabrikasi, susu bubuk menempati urutan pertama dalam tingkat produksinya dibanding jenis susu lainnya, hal ini disebabkan luasnya jaringan pasar serta dapat dikonsumsi oleh semua umur mulai dari bayi, orang dewasa, sampai dengan manula.

2.2 Sentra Produksi Susu

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan – Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2012 terdapat 621.800 ekor sapi perah di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun produksi susu sapi mencapai 981.588 ton di tahun 2012. Tiga provinsi dengan populasi sapi perah dan produksi susu terbesar secara berturut-turut adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. Ketiga provinsi tersebut memiliki populasi sapi perah di atas 100.000 ekor dan produksi susu di atas 200.000 ton.

Gambar berikut ini merupakan peta wilayah populasi sapi perah dan produksi susu di seluruh provinsi di Indonesia.



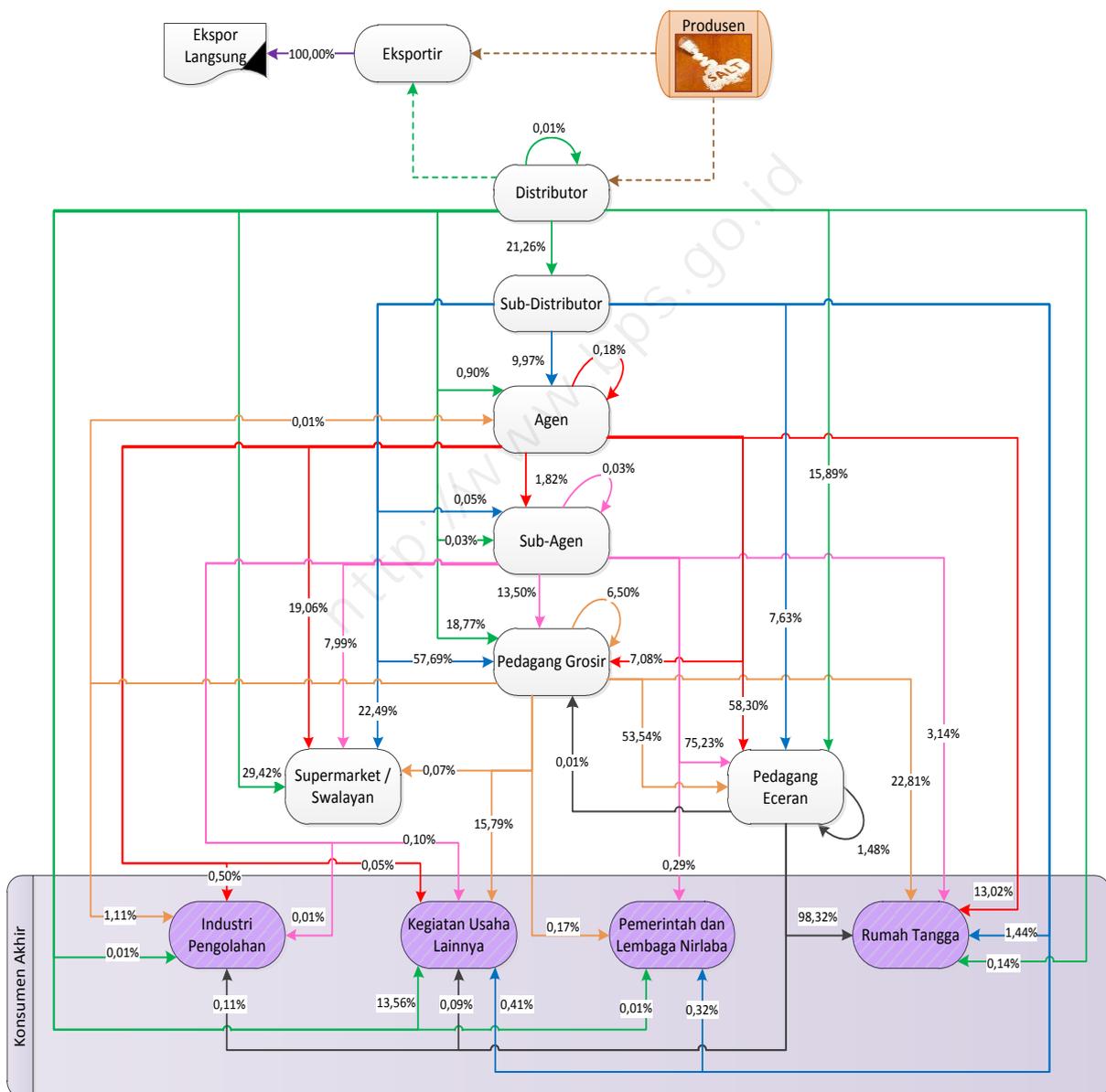
Gambar 1. Peta Wilayah Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu di Indonesia

2.3 Distribusi Perdagangan Susu Bubuk Nasional

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan susu bubuk meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan susu bubuk meliputi 126 kabupaten/kota di 34 provinsi.

2.3.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan susu bubuk menunjukkan pola yang kompleks sebagaimana tampak pada Gambar 2. Seluruh fungsi usaha perdagangan terlibat dalam rantai distribusi perdagangan susu bubuk, termasuk di dalamnya eksportir yang mendistribusikan susu bubuk ke luar negeri.



Gambar 2. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Indonesia

2.3.2 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Indonesia

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	10.289.207	333.609	4.691.336
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	9.095.864	301.263	4.150.803
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.193.343	32.346	540.533
Rasio Marjin (%)	13,12	10,74	13,02

Berdasarkan dari tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp1,19 miliar dengan rasio marjin sebesar 13,12 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 13,12 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp32,35 juta dengan rasio marjin sebesar 10,74 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,74 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp540,53 juta dengan rasio marjin sebesar 13,02 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 13,02 persen.

Berikut dibawah ini akan diuraikan distribusi susu bubuk di setiap provinsi di Indonesia.

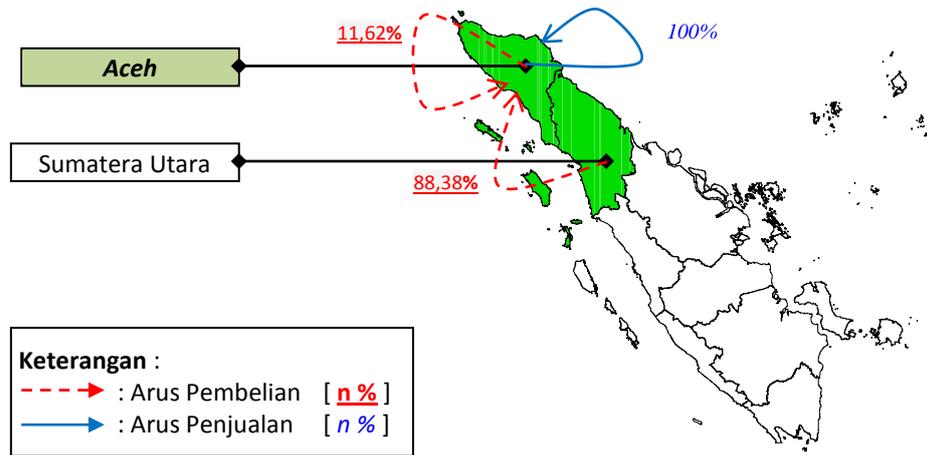
2.4 Distribusi Perdagangan Susu Bubuk Perprovinsi

2.4.1 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Banda Aceh.

2.4.1.1 Peta Distribusi

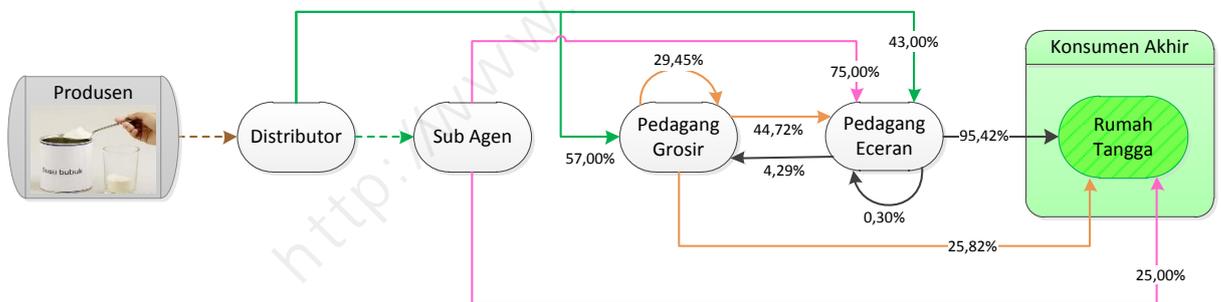
Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang susu bubuk di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa pedagang komoditi ini mendapatkan sebanyak 88,38 persen pasokan susu bubuk dari luar provinsi, yakni dari Kota Medan Sumatera Utara. Sisanya pasokan diambil dari dalam wilayah Provinsi Aceh sendiri, yaitu sebesar 11,62 persen. Pasokan susu bubuk tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Aceh. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Aceh disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Aceh

2.4.1.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Aceh melibatkan distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen kemudian menjualnya ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara itu sub agen membeli pasokan dari distributor. Penjualan komoditas dari sub agen adalah ke pedagang eceran dan rumah tangga. Adapun pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada gambar pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 4. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Aceh

2.4.1.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Aceh sebagai berikut.

Tabel 2.2. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Aceh

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.518.673	145.888	894.680
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.383.080	136.061	816.253
Rata-rata MPP (000 Rp)	135.593	9.827	78.426
Rasio Marjin (%)	9,80	7,22	9,61

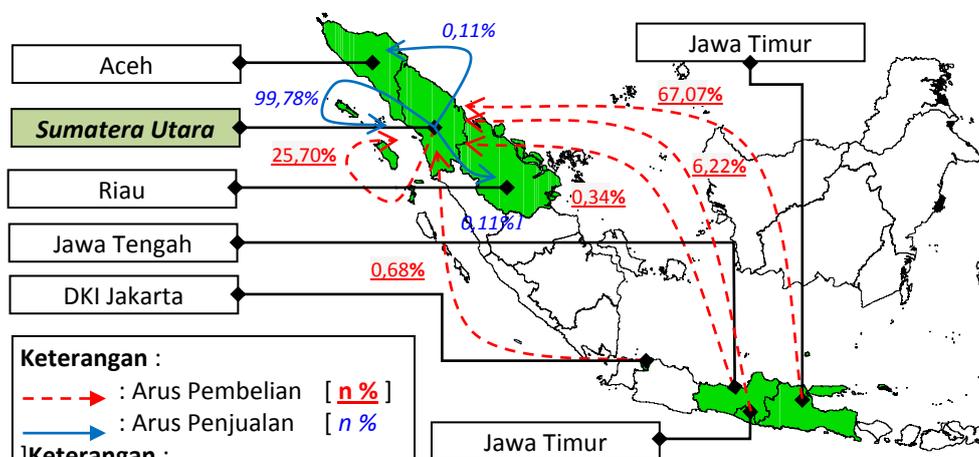
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp135,59 juta dengan rasio margin sebesar 9,8 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,8 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp9,83 juta dengan rasio margin sebesar 7,22 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,22 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp78,43 juta dengan rasio margin sebesar 9,61 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,61 persen.

2.4.2 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Tebing Tinggi, dan Kota Medan.

2.4.2.1 Peta Distribusi

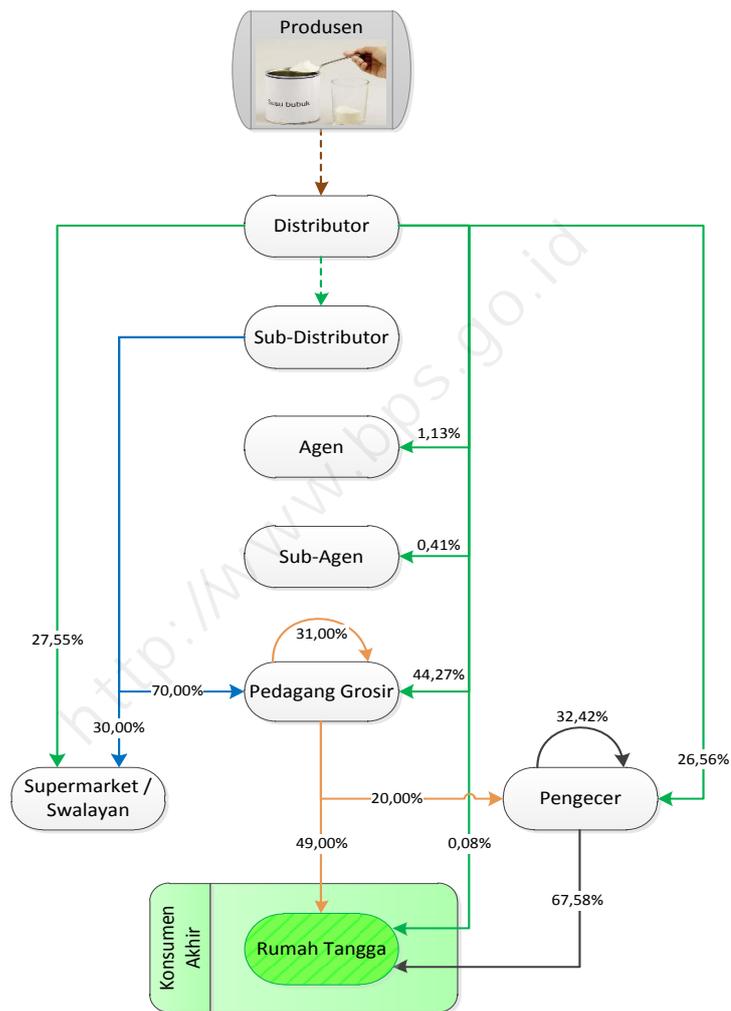
Hasil survei terhadap beberapa responden pedagang susu bubuk di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pedagang komoditi ini mendapatkan sebanyak 25,69 persen pasokan susu bubuk dari dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara sendiri dan 74,31 persen pasokan dari luar provinsi, yakni dari Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya. Diantara keempat wilayah tersebut, pedagang di Sumatera Utara mendapatkan pasokan terbesar dari Kota Surabaya, yakni sebanyak 67,07 persen. Pasokan susu bubuk tersebut kemudian dijual sebanyak 99,75 persen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam provinsi Sumatera Utara dan sebanyak 0,22 persen dijual ke luar provinsi yakni ke Kota Sulubussalam Provinsi Aceh dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Utara

2.4.2.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Sumatera Utara melibatkan distributor, sub distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen kemudian menjualnya ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan konsumen akhir. Sementara itu sub distributor membeli pasokan dari distributor kemudian mengalokasikan barang dagangannya ke pedagang grosir dan supermarket. Adapun pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Utara

2.4.2.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 2.3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	19.210.831	58.610	4.565.015
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	17.927.740	56.391	4.261.414
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.283.092	2.218	303.600
Rasio Marjin (%)	7,16	3,93	7,12

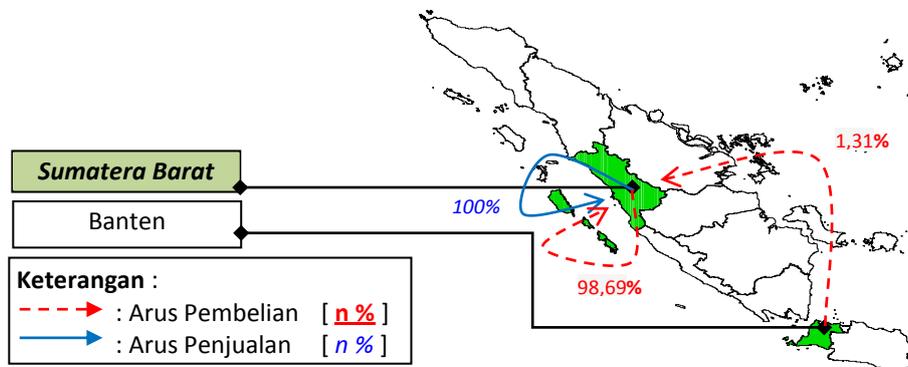
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp1,28 miliar dengan rasio marjin sebesar 7,16 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,16 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp2,22 juta dengan rasio marjin sebesar 3,93 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,93 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp303,6 juta dengan rasio marjin sebesar 7,12 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,12 persen.

2.4.3 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, dan Kota Bukittinggi.

2.4.3.1 Peta Distribusi

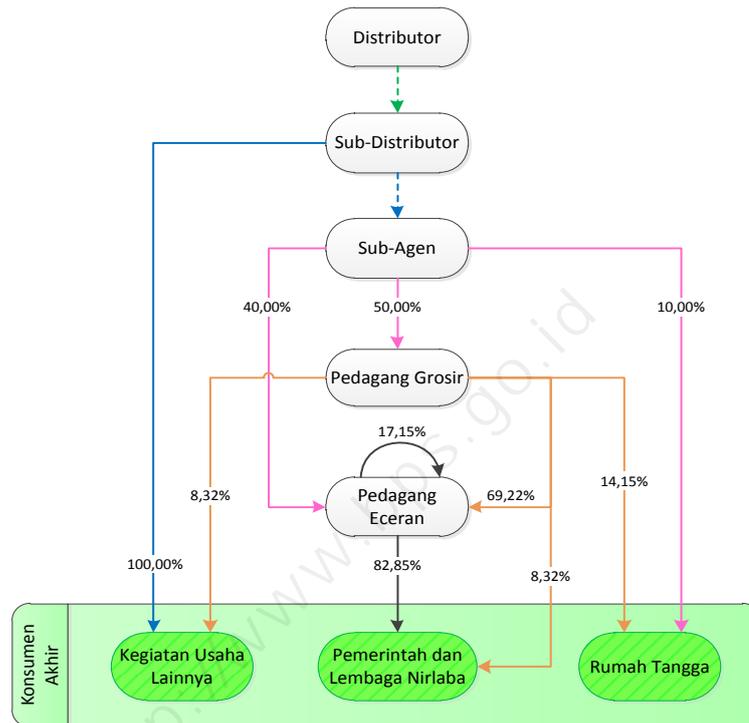
Distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan pada Gambar 7. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan susu bubuk sebagian besar (98,68%) berasal dari dalam provinsi dan sebagian kecil (1,31%) berasal dari luar provinsi, yakni Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, seluruh pasokan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Provinsi Sumatera Barat sendiri.



Gambar 7. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Barat

2.4.3.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa fungsi usaha perdagangan susu bubuk di Provinsi Sumatera Barat adalah distributor, sub distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara sub distributor mendapatkan pasokan dari distributor, pedagang grosir mendapatkan pasokan dari sub agen. Adapun pedagang eceran mendapatkan pasokan dari sub agen, pedagang grosir, dan sesama pedagang eceran. Pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Barat

2.4.3.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut.

Tabel 2.4. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	254.437	18.513	163.697
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	230.262	16.788	148.157
Rata-rata MPP (000 Rp)	24.175	1.724	15.540
Rasio Marjin (%)	10,50	10,27	10,49

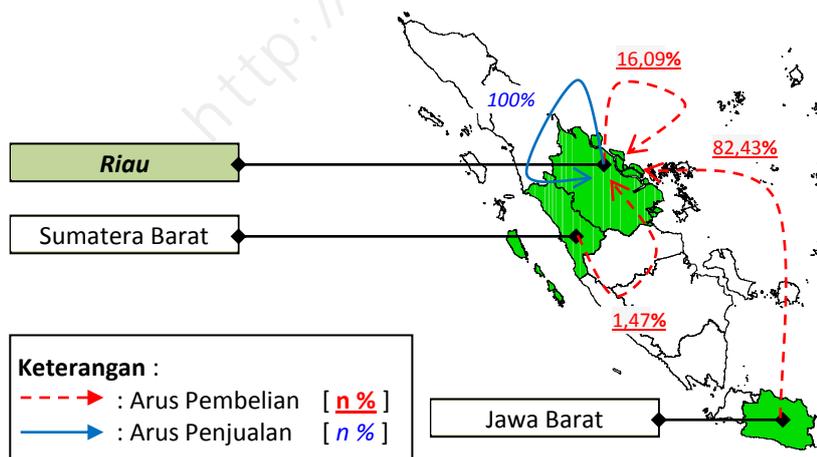
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp24,17 juta dengan rasio margin sebesar 10,5 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,5 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp1,72 juta dengan rasio margin sebesar 10,27 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,27 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp15,54 juta dengan rasio margin sebesar 10,49 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,49 persen.

2.4.4 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

2.4.4.1 Peta Distribusi

Di tingkat pedang diketahui bahwa asal pasokan susu bubuk di Provinsi Riau sebagian besar (82,43%) adalah berasal dari luar pulau yakni dari Kota Bekasi. Pasokan susu bubuk dari dalam Provinsi Riau sebesar 16,09 persen dan dari provinsi Sumatera Barat sebesar 1,47 persen. Seluruh pasokan tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Riau disajikan pada gambar berikut ini:

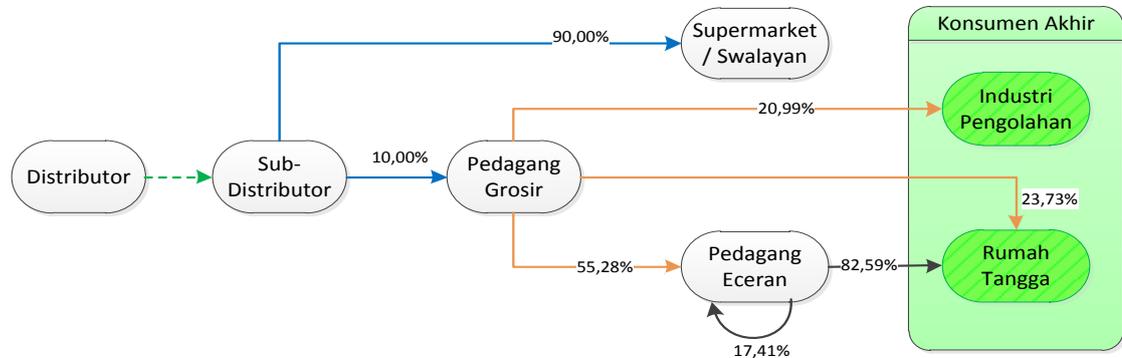


Gambar 9. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Riau

2.4.4.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha perdagangan susu bubuk di Provinsi Riau adalah sub distributor, pedagang grosir, dan pengecer. Penjualan komoditi dari

subdistributor adalah ke pedagang grosir dan supermarket. Sementara itu pedagang grosir mendistribusikan komoditinya ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Adapun pendistribusian susu bubuk dari pedagang eceran sebagian besar adalah ke rumah tangga dan sebagian kecil ke sesama pedagang eceran seperti yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Riau

2.4.4.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Riau sebagai berikut.

Tabel 2.5. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Riau

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	23.796	804.426	284.006
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	22.465	630.944	225.291
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.332	173.482	58.715
Rasio Marjin (%)	5,93	27,50	26,06

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp1,33 juta dengan rasio marjin sebesar 5,93 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,93 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp173,48 juta dengan rasio marjin sebesar 27,5 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 27,5 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar

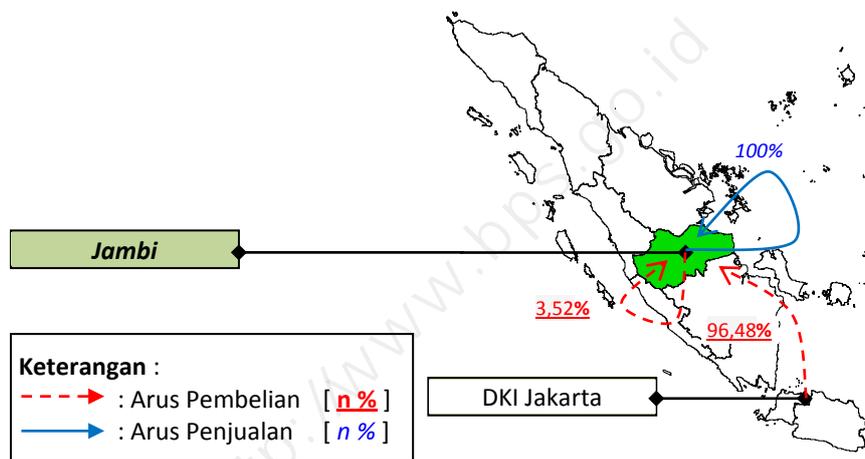
Rp58,71 juta dengan rasio margin sebesar 26,06 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 26,06 persen.

2.4.5 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi.

2.4.5.1 Peta Distribusi

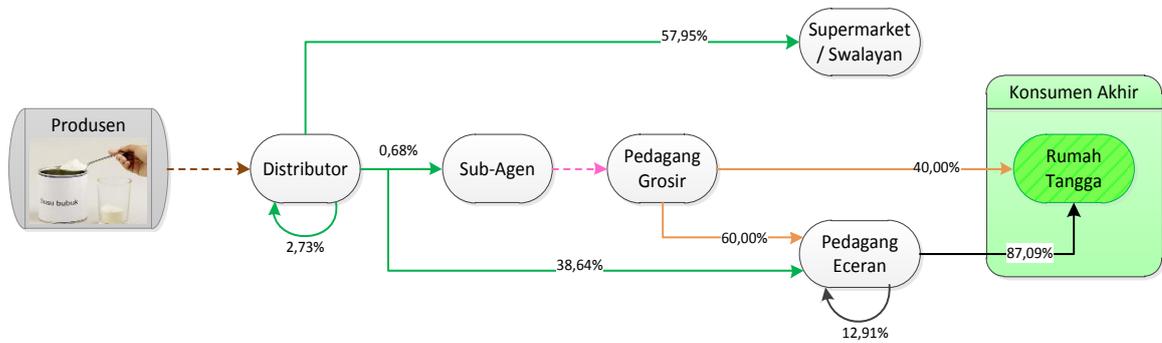
Hasil survei pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sebanyak 96,48 persen pasokan susu bubuk berasal dari Kota Administrasi Jakarta Timur. Sisanya diperoleh dari dalam provinsi. Pasokan tersebut kemudian didistribusikan sepenuhnya ke wilayah provinsi seperti yang disajikan pada peta distribusi perdagangan berikut ini.



Gambar 11. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jambi

2.4.5.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Jambi melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara distributor mendapatkan pasokan seluruhnya dari produsen, pedagang grosir dan pengecer mendapatkan pasokan dari pedagang-pedagang lainnya. Distributor tersebut kemudian menjual pasokan ke pedagang eceran seperti supermarket dan pengecer langsung. Adapun pedagang grosir dan pengecer selain menjual ke pedagang lainnya juga mendistribusikan pasokan tersebut langsung ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jambi

2.4.5.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Jambi sebagai berikut.

Tabel 2.6. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Jambi

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	5.021.333	10.800	1.889.750
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	4.926.976	10.042	1.853.892
Rata-rata MPP (000 Rp)	94.358	758	35.858
Rasio Marjin (%)	1,92	7,55	1,93

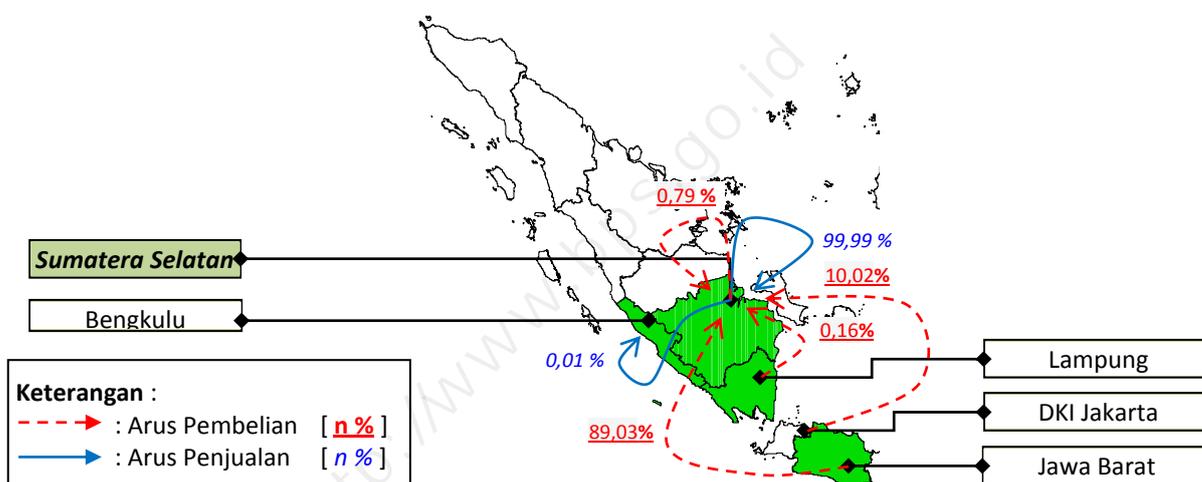
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp94,36 juta dengan rasio marjin sebesar 1,92 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,92 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp757800 dengan rasio marjin sebesar 7,55 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,55 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp35,86 juta dengan rasio marjin sebesar 1,93 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,93 persen.

2.4.6 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuk Linggau.

2.4.6.1 Peta Distribusi

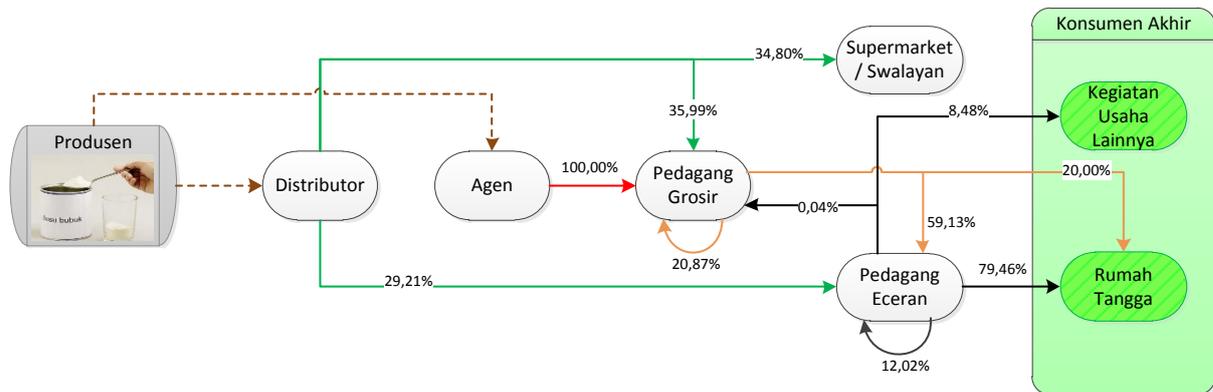
Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa asal pasokan susu bubuk di Provinsi Sumatera Selatan hanya sebagian kecil berasal dari dalam Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Sebagian besar pasokan yakni sebanyak 99,21 persen berasal dari berbagai daerah di luar provinsi. Wilayah pemasok susu bubuk dari luar provinsi adalah Kota Bandar Lampung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Bekasi. Susu bubuk tersebut oleh pedagang dijual ke dalam Provinsi Sumatera Selatan sebesar 99,99 persen dan ke Kabupaten Rejang Lebong sebesar 0,01 persen. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 13. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.6.2 Pola Distribusi

Perdagangan susu bubuk di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan fungsi usaha distributor, agen, pedagang grosir, dan pengecer. Selain mendapatkan pasokan dari sesama distributor, fungsi usaha ini mendapatkan pasokan dari produsen. Kemudian pasokan tersebut didistribusikan ke pedagang grosir, supermarket, dan pengecer langsung. Adapun agen yang mendapatkan pasokan sepenuhnya dari produsen, memasarkan komoditinya seluruhnya ke pedagang grosir. Pembelian dan penjualan pasokan dari fungsi usaha lainnya beserta besaran nilai persentasenya digambarkan pada pola distribusi berikut ini.



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Susu bubuk di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.6.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.7. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	7.131.917	586.160	3.666.516
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	5.664.379	509.660	2.935.410
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.467.538	76.500	731.106
Rasio Marjin (%)	25,91	15,01	24,91

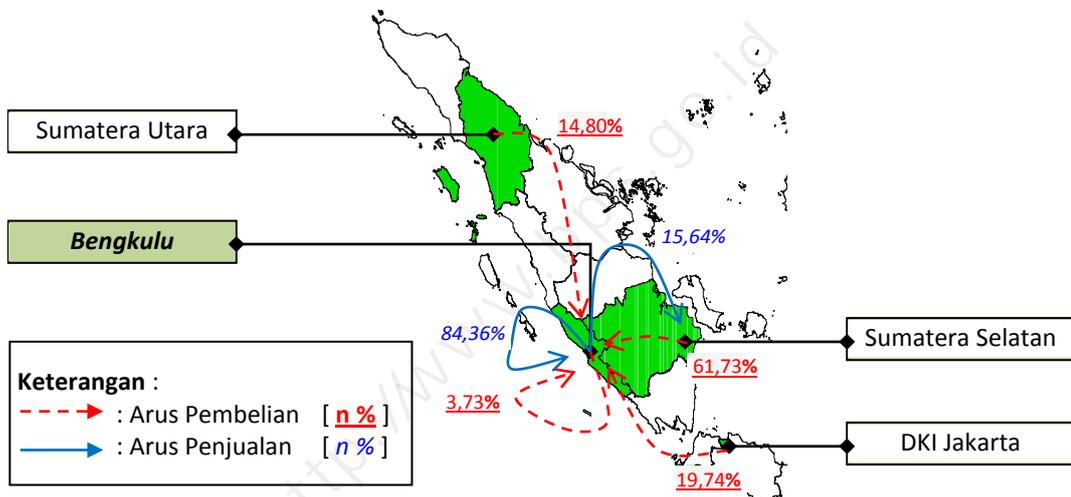
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp1,47 miliar dengan rasio marjin sebesar 25,91 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 25,91 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp76,50 juta dengan rasio marjin sebesar 15,01 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 15,01 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp731,11 juta dengan rasio marjin sebesar 24,91 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 24,91 persen.

2.4.7 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu.

2.4.7.1 Peta Distribusi

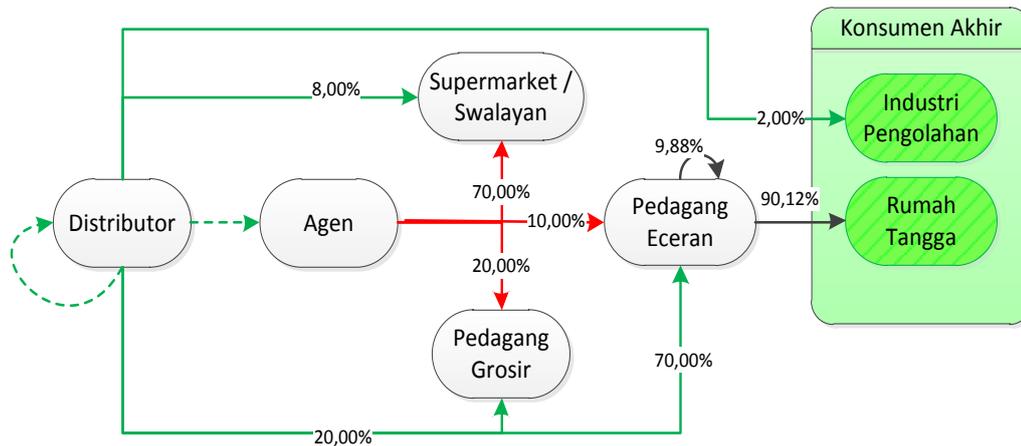
Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk berasal dari dalam provinsi dan dari luar provinsi. Wilayah pemasok dari dalam provinsi adalah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong, sementara wilayah pemasok dari luar provinsi adalah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 84,36 persen pasokan susu bubuk didistribusikan ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 15,64 persen dipasarkan ke Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Bengkulu secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 15. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Bengkulu

2.4.7.2 Pola Distribusi

Distribusi susu bubuk di Provinsi Bengkulu melibatkan fungsi usaha distributor, agen, dan pedagang eceran. Pelaku-fungsi usaha perdagangan tersebut mendapatkan pasokan susu bubuk dari distributor. Adapun pedagang eceran selain mendapatkan pasokan dari distributor, juga mendapatkan sebagian pasokan susu bubuk dari agen. Sementara agen hanya memasarkan susu bubuk ke fungsi usaha lainnya, distributor dan pedagang eceran mendistribusikan komoditi ini ke sesama pedagang lain dan juga ke konsumen akhir. Konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan dan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Bengkulu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 16. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Bengkulu

2.4.7.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

Tabel 2.8. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Bengkulu

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	8.864.981	132.954	2.073.405
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	7.980.966	125.316	1.871.016
Rata-rata MPP (000 Rp)	884.015	7.638	202.389
Rasio Marjin (%)	11,08	6,10	10,82

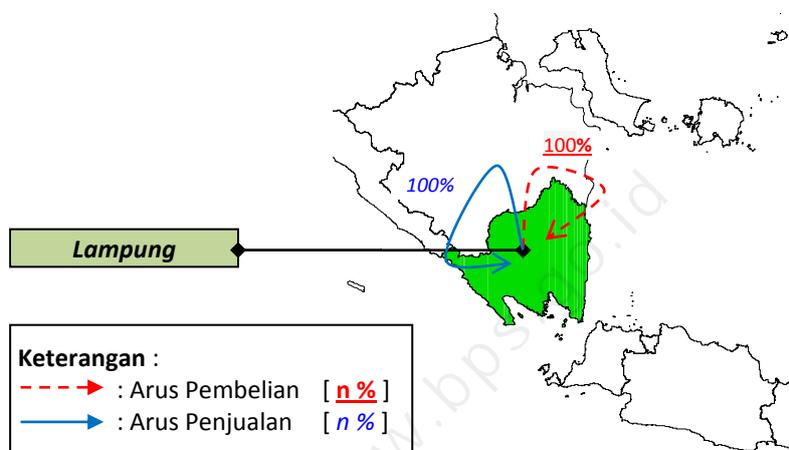
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp884,02 juta dengan rasio marjin sebesar 11,08 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 11,08 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp7,64 juta dengan rasio marjin sebesar 6,10 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,10 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp202,39 juta dengan rasio marjin sebesar 10,82 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 10,82 persen.

2.4.8 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Tulangbawang, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

2.4.8.1 Peta Distribusi

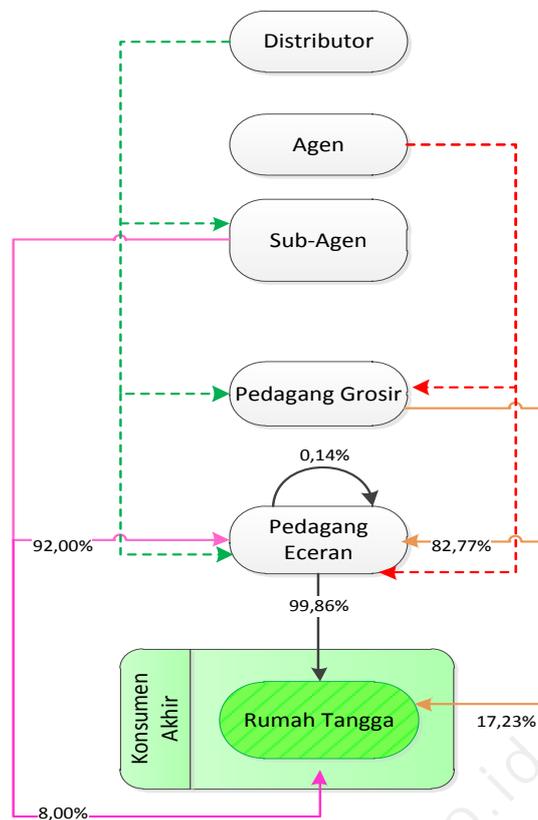
Hasil survei menunjukkan pedagang di Provinsi Lampung mendapatkan pasokan susu bubuk seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Lampung sendiri. Pasokan terbesar berasal dari Kota Bandar Lampung. Susu bubuk tersebut selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam Provinsi Lampung sendiri dengan pendistribusian terbesar adalah ke Kabupaten Tulangbawang. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 17. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Lampung

2.4.8.2 Pola Distribusi

Perdagangan susu bubuk di Provinsi Lampung melibatkan fungsi usaha sub agen, pedagang grosir dan juga pedagang eceran. Sub agen mendapatkan pasokan susu bubuk dari distributor. Sementara itu pedagang grosir dan pedagang eceran mendapatkan pasokan dari distributor dan dari agen. Seluruh fungsi usaha perdagangan tersebut memasarkan komoditinya ke pedagang lainnya dan konsumen akhir rumah tangga. Pola distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Lampung digambarkan sebagai berikut.



Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Lampung

2.4.8.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Lampung sebagai berikut.

Tabel 2.9. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Lampung

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	64.733	195.480	97.420
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	61.018	187.588	92.661
Rata-rata MPP (000 Rp)	3.715	7.892	4.759
Rasio Marjin (%)	6,09	4,21	5,14

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp3,72 juta dengan rasio marjin sebesar 6,09 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,09 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp7,89 juta dengan rasio marjin sebesar 4,21 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,21 persen. Jika

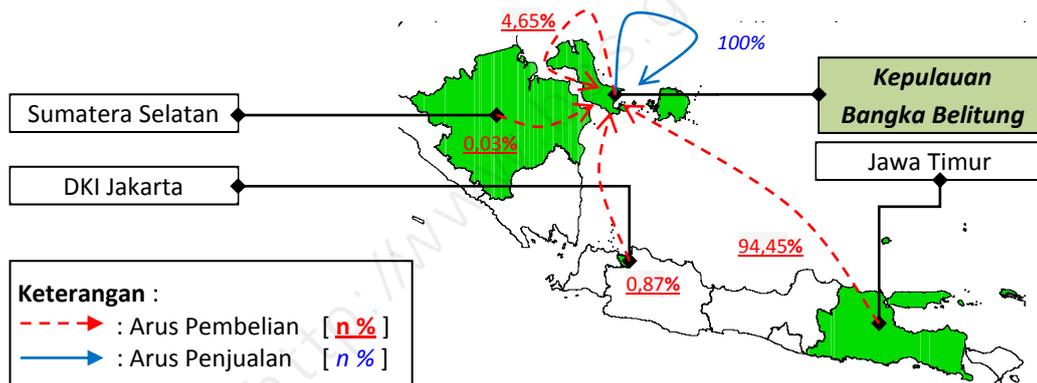
digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp4,76 juta dengan rasio marjin sebesar 5,14 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,14 persen.

2.4.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Belitung dan Kota Pangkal Pinang.

2.4.9.1 Peta Distribusi

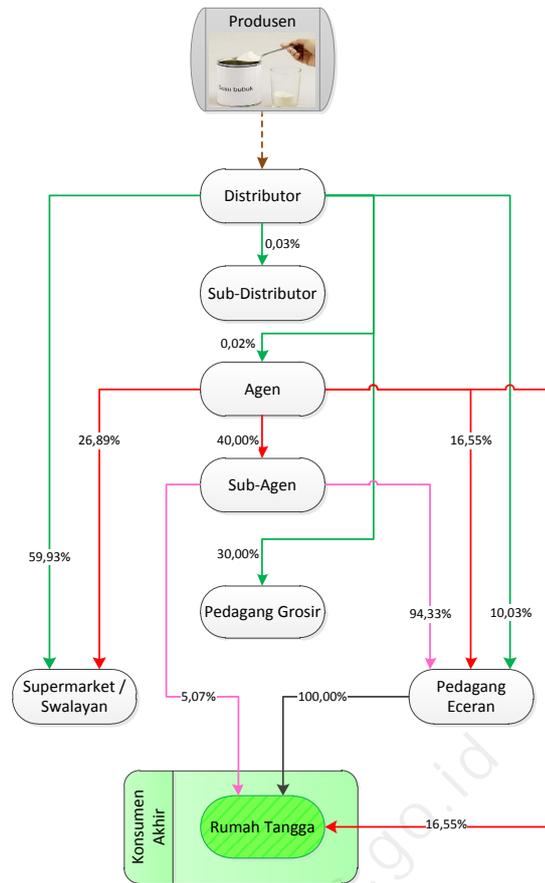
Distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lengkap ditunjukkan oleh Gambar 19. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa sebanyak 95,35 persen pasokan diperoleh dari luar provinsi. Pasokan terbesar berasal dari Kota Surabaya yakni sebesar 94,45 persen. Wilayah di luar provinsi lainnya yang turut memasok susu bubuk adalah Kota administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Lubuklinggau. Pendistribusian komoditi ini seluruhnya adalah untuk pemenuhan konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri.



Gambar 19. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4.9.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melibatkan fungsi usaha distributor, agen, sub agen, dan pedagang eceran. Adapun konsumen susu bubuk di provinsi ini adalah rumah tangga. Proses pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta nilai besarnya, sampai akhirnya dijual ke konsumen akhir rumah tangga digambarkan pada pola distribusi perdagangan berikut ini.



Gambar 20. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.4.9.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut.

Tabel 2.10. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)Susu bubuk di Provinsi Bangka Belitung

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	11.269.244	390.716	8.549.612
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	10.818.580	366.047	8.205.447
Rata-rata MPP (000 Rp)	450.664	24.670	344.165
Rasio Marjin (%)	4,17	6,74	4,19

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp450,66 juta dengan rasio marjin sebesar 4,17 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,17 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar

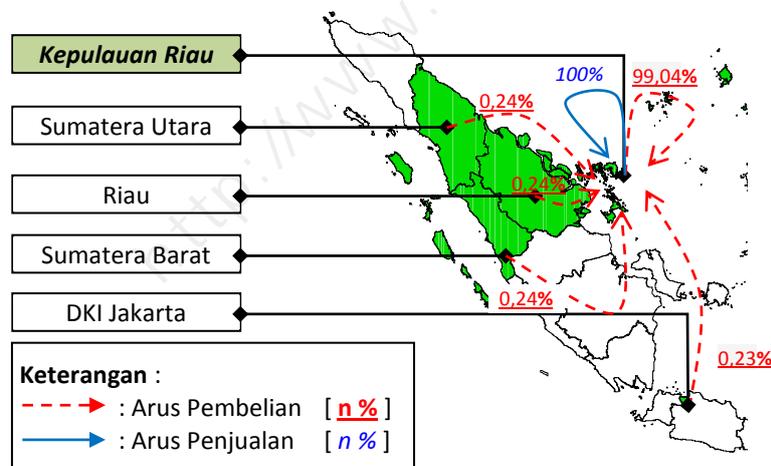
Rp24,67 juta dengan rasio margin sebesar 6,74 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,74 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp344,16 juta dengan rasio margin sebesar 4,19 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,19 persen.

2.4.10 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

2.4.10.1 Peta Distribusi

Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kepulauan Riau memberikan informasi bahwa sebanyak 99,04 persen pasokan susu bubuk berasal dari dalam provinsi, yakni dari Kota Batam (98,19%) dan Kota Tanjung Pinang (0,85%). Sisanya dipasok dari wilayah di dalam dan luar provinsi. Wilayah di luar provinsi yang turut memasok susu bubuk ke provinsi ini adalah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Pasokan tersebut kemudian seluruhnya didistribusikan ke dalam provinsi sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

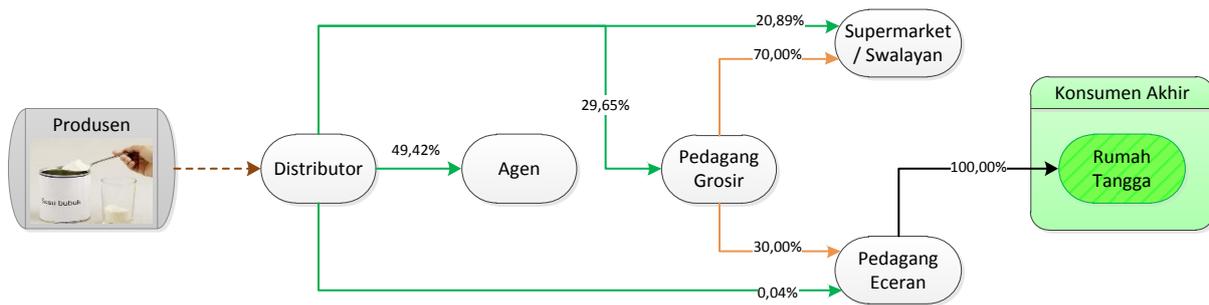


Gambar 21. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kepulauan Riau

2.4.10.2 Pola Distribusi

Perdagangan susu bubuk di Povinsi Kepulauan Riau melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan dari produsen. Sementara itu pedagang grosir mendapatkan pasokan dari distributor. Adapun pedagang eceran mendapatkan pasokan dari distributor dan pedagang grosir. Distributor dan pedagang grosir mendistribusikan pasokannya ke fungsi usaha perdagangan lainnya,

sedangkan pedagang eceran menjual susu bubuk langsung ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Kepulauan Riau digambarkan sebagai berikut.



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kepulauan Riau

2.4.10.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.11. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	12.566.253	190.230	8.440.912
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	11.311.260	181.560	7.601.360
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.254.993	8.670	839.552
Rasio Marjin (%)	11,10	4,78	11,04

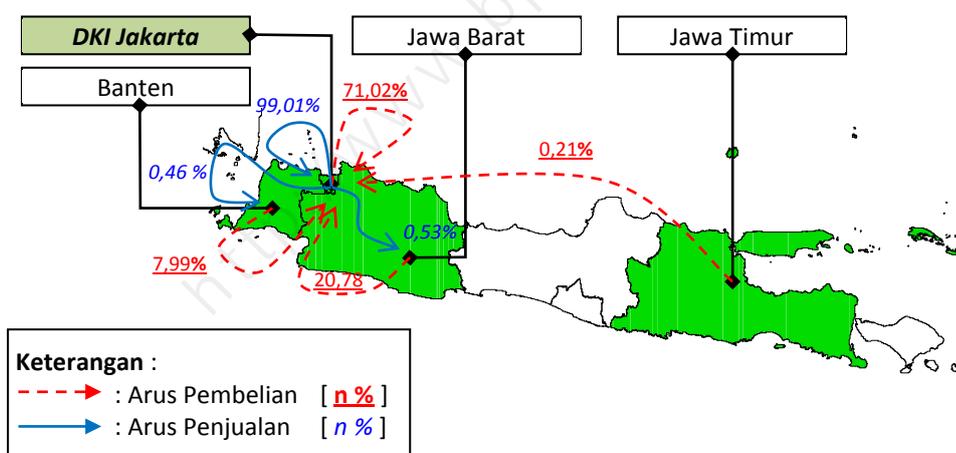
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp1,25 miliar dengan rasio marjin sebesar 11,1 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 11,1 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp8,67 juta dengan rasio marjin sebesar 4,78 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,78 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp839,55 juta dengan rasio marjin sebesar 11,04 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 11,04 persen.

2.4.11 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

2.4.11.1 Peta Distribusi

Survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk berasal dari wilayah di dalam provinsi dan beberapa wilayah di provinsi sekitar. Sebanyak 71,02 persen pasokan susu bubuk berasal dari kota-kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sisanya sebanyak 28,98 persen dipasok dari kabupaten/kota di luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Sebanyak 99,01 persen pendistribusian komoditi ini adalah ke wilayah-wilayah di dalam Provinsi DKI Jakarta sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 1,00 persen pasokan dijual ke luar provinsi yaitu ke Provinsi Jawa Barat (0,53%) dan Provinsi Banten (0,46%). Wilayah pendistribusian di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi (0,19%) dan Kota Bekasi (0,34%), sedangkan wilayah pendistribusian di Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang (0,46%). Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

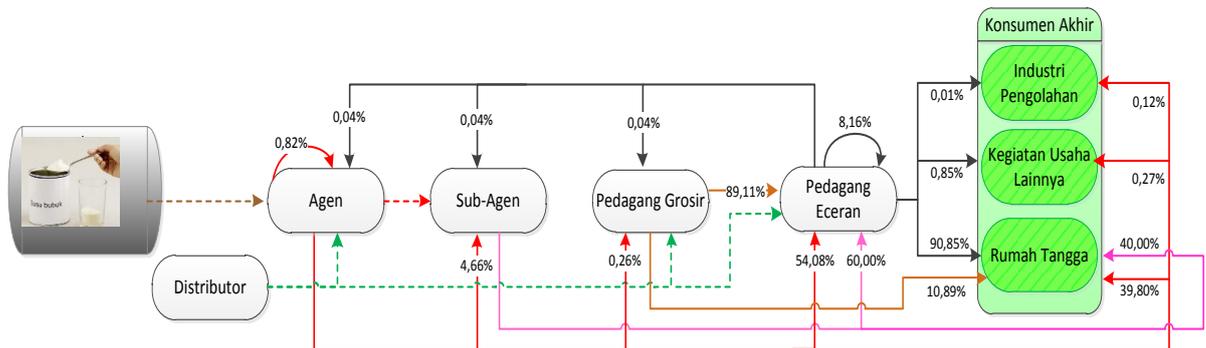


Gambar 23. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi DKI Jakarta

2.4.11.2 Pola Distribusi

Perdagangan susu bubuk di Povinsi DKI Jakarta melibatkan fungsi usaha agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara sub agen mendapatkan pasokan seluruhnya dari agen, agen sendiri mendapatkan pasokan dari produsen dan distributor. Sementara itu pedagang grosir mendapatkan pasokan dari distributor dan agen. Adapun pedagang eceran mendapatkan pasokand ari fungsi usaha perdagangan lainnya. Dari sisi penjualan, fungsi usaha agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran tersebut mendistribusikan komoditi ini ke fungsi usaha perdagangan lainnya untuk dijual kembali

dan juga langsung ke konsumen akhir seperti industri pengolahan dan rumah tangga. Pembelian dan penjualan komoditi susu bubuk di Provinsi DKI Jakarta dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta nilai besaran persentasenya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 24. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi DKI Jakarta

2.4.11.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

Tabel 2.12. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi DKI Jakarta

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	280.793	305.833	299.643
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	247.931	217.086	224.711
Rata-rata MPP (000 Rp)	32.862	88.746	74.932
Rasio Marjin (%)	13,25	40,88	33,35

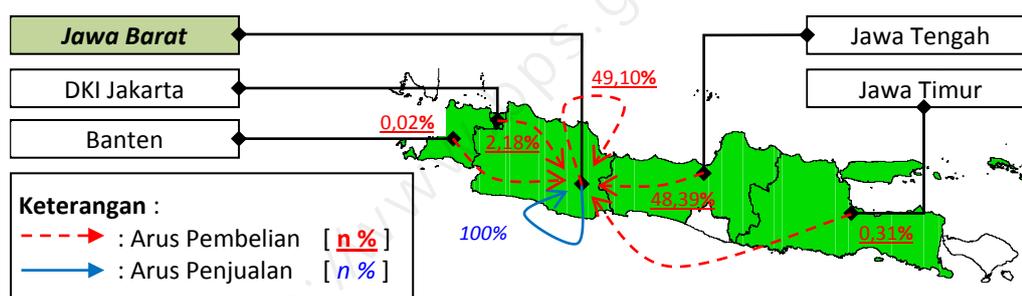
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp32,86 juta dengan rasio marjin sebesar 13,25 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 13,25 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp88,75 juta dengan rasio marjin sebesar 40,88 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 40,88 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp74,93 juta dengan rasio marjin sebesar 33,35 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 33,35 persen.

2.4.12 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

2.4.12.1 Peta Distribusi

Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk berasal dari wilayah di dalam provinsi dan beberapa wilayah di provinsi sekitar. Pasokan yang berasal dari wilayah di dalam provinsi adalah sebanyak 49,10 persen, sedangkan sebanyak 50,90 persen sisanya berasal dari kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Dari ketiga provinsi tersebut, Provinsi Jawa Tengah merupakan pemasok susu bubuk terbesar, yakni sebanyak 48,39 persen. Pasokan tersebut sepenuhnya dipasarkan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Provinsi Jawa Barat sendiri, seperti yang digambarkan pada peta berikut ini.

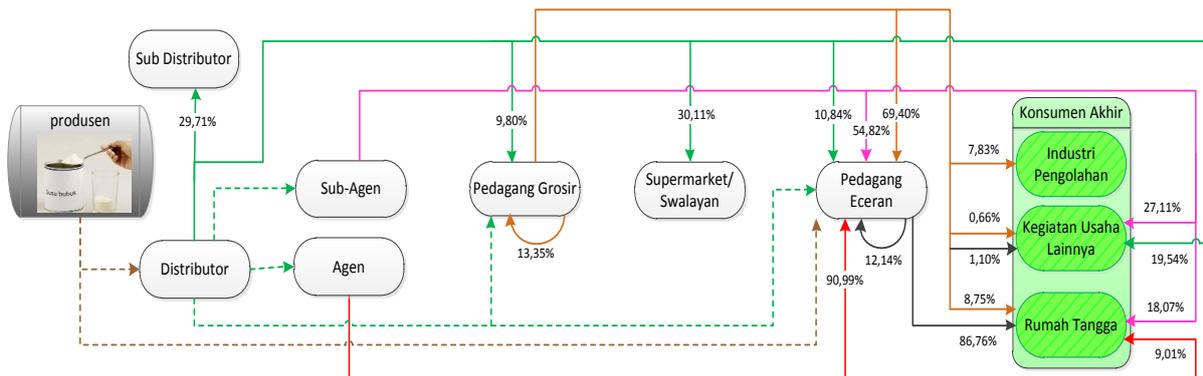


Gambar 25. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jawa Barat

2.4.12.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Jawa Barat melibatkan fungsi usaha perdagangan distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan pengecer. Diantara kelima fungsi usaha tersebut, distributor dan pengecer mendapatkan pasokan dari produsen. Distributor mendapatkan pasokan sepenuhnya dari produsen, sedangkan pedagang eceran memperolehnya hanya sebagian kecil saja dan mendapatkan sebagian pasokan lagi dari fungsi usaha lainnya termasuk dari sesama pedagang eceran. Adapun fungsi usaha agen, sub agen, dan pedagang grosir mendapatkan pasokan susu bubuk dari fungsi usaha perdagangan lainnya. Pendistribusian susu bubuk dari kelima fungsi usaha tersebut adalah ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan juga langsung ke konsumen akhir seperti industri pengolahan dan rumah tangga. Pembelian dan

penjualan komoditi susu bubuk di Provinsi Jawa Barat untuk setiap fungsi usaha perdagangan beserta nilai besaran persentasenya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jawa Barat

2.4.12.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 2.13. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Jawa Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	54.476.941	92.752	24.177.178
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	47.728.765	75.513	21.179.096
Rata-rata MPP (000 Rp)	6.748.176	17.239	2.998.082
Rasio Marjin (%)	14,14	22,83	14,16

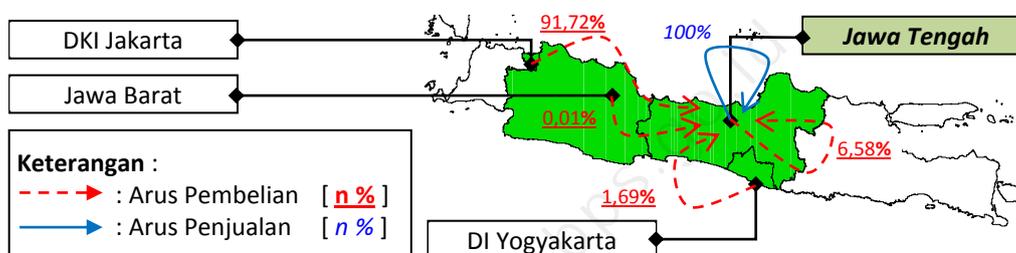
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp6,75 miliar dengan rasio marjin sebesar 14,14 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 14,14 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp17,24 juta dengan rasio marjin sebesar 22,83 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 22,83 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp3 miliar dengan rasio marjin sebesar 14,16 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 14,16 persen.

2.4.13 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

2.4.13.1 Peta Distribusi

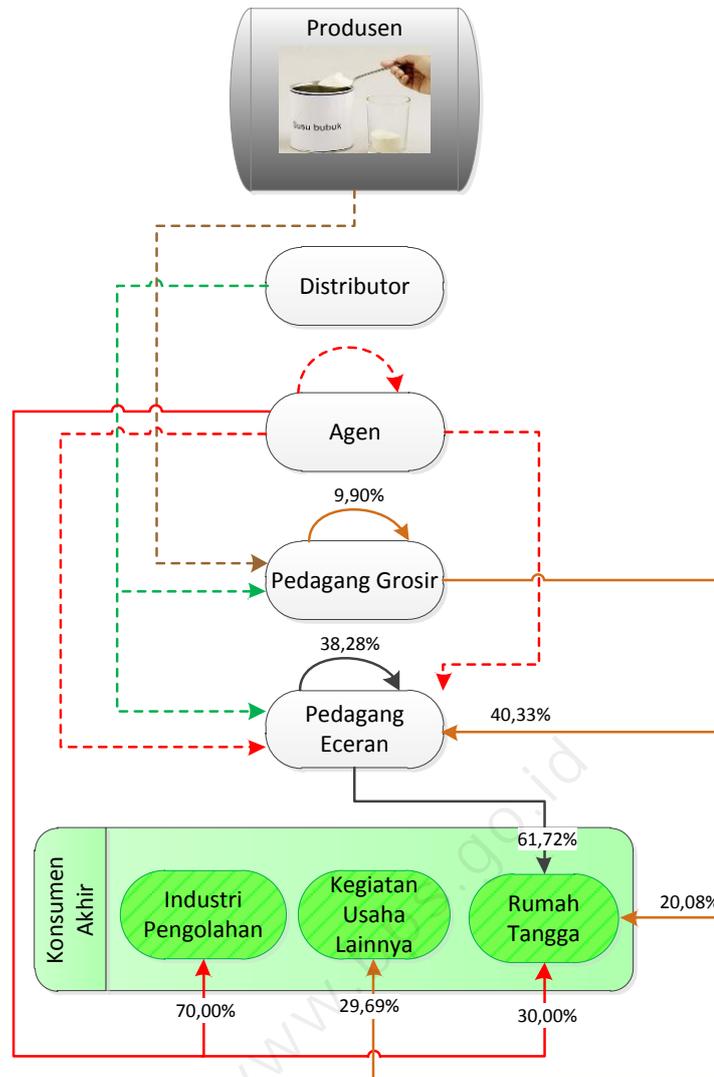
Hasil survei distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebanyak 91,72 persen pasokan komoditi susu bubuk di provinsi ini berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Sisanya sebanyak 8,27 persen berasal dari kabupaten/kota di dalam provinsi dan kabupaten/kota lain di provinsi sekitar yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DI Yogyakarta. Seluruh pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah di dalam provinsi. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 27. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jawa Tengah

2.4.13.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Jawa Tengah melibatkan fungsi usaha perdagangan agen, pedagang grosir, dan pengecer. Diantara kelima fungsi usaha tersebut, hanya pedagang grosir yang mendapatkan sebagian pasokan langsung dari produsen dan sebagian lagi diperoleh dari distributor dan agen. Sedangkan fungsi usaha pedagang grosir dan pengecer mendapatkan seluruh pasokan susu bubuk dari fungsi usaha perdagangan lainnya. Dari sisi penjualan, agen mendistribusikan komoditi ini seluruhnya ke konsumen akhir, yakni industri pengolahan dan rumah tangga. Adapun pedagang grosir dan pengecer, selain mendistribusikannya langsung ke konsumen akhir, juga menjual komoditi ini ke pedagang lainnya. Pembelian dan penjualan komoditi susu bubuk di Provinsi Jawa Tengah dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta nilai besaran persentasenya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 28. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jawa Tengah

2.4.13.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.14. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	2.814.986	98.683	641.943
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.626.550	93.117	599.804
Rata-rata MPP (000 Rp)	188.435	5.566	42.140
Rasio Marjin (%)	7,17	5,98	7,03

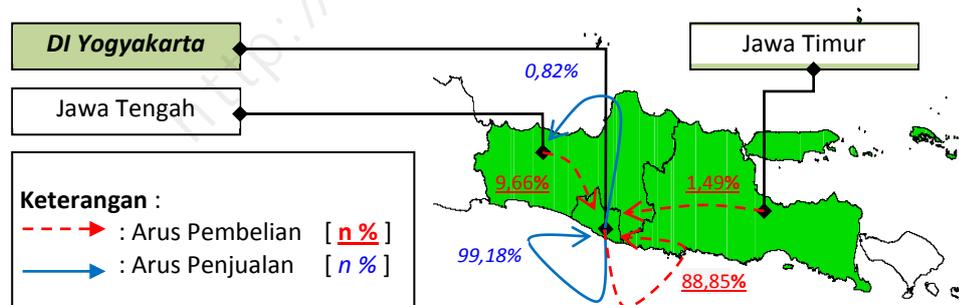
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp188,44 juta dengan rasio margin sebesar 7,17 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,17 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp5,57 juta dengan rasio margin sebesar 5,98 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,98 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp42,14 juta dengan rasio margin sebesar 7,03 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,03 persen.

2.4.14 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

2.4.14.1 Peta Distribusi

Pasokan susu bubuk di Provinsi D.I. Yogyakarta sebagian besar berasal dari dalam provinsi, yaitu sebesar 88,85 persen. Sisanya sebesar 11,15 persen berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Adapun penjualan susu bubuk seluruhnya adalah ke dalam Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 99,18 persen dan ke provinsi Jawa Tengah sebesar 0,82 persen. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

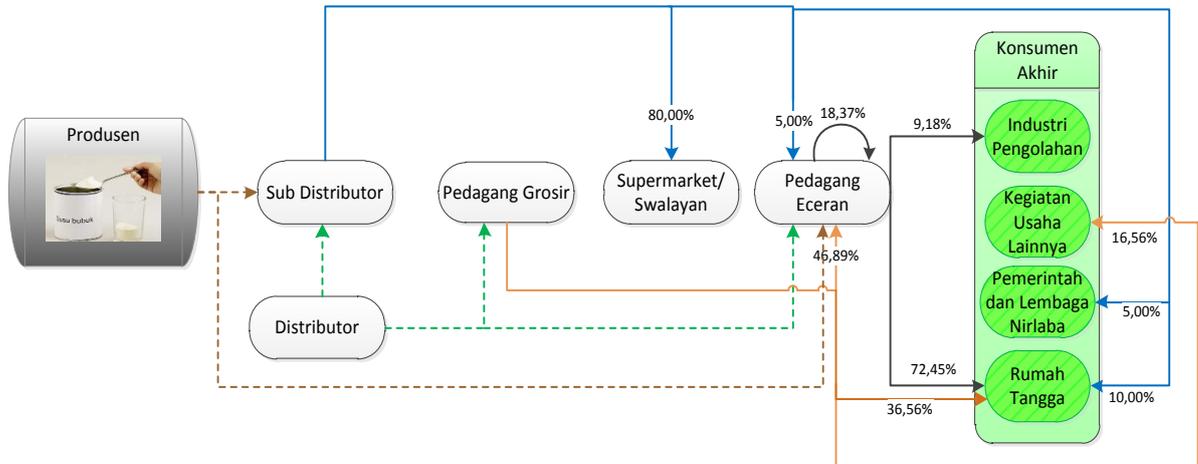


Gambar 29. Peta Distribusi Perdagangan Susu bubuk di Provinsi D.I. Yogyakarta

2.4.14.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi susu bubuk di Provinsi D.I. Yogyakarta melibatkan fungsi usaha sub distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Sub distributor dan pedagang eceran mendapatkan sebagian pasokan langsung dari produsen. Sedangkan pedagang grosir mendapat pasokan dari fungsi usaha lainnya. Ketiga fungsi usaha ini kemudian mendistribusikan komoditinya ke pedagang lain dan konsumen akhir yang terdiri

dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, dan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi D.I. Yogyakarta

2.4.14.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi DI Yogyakarta sebagai berikut.

Tabel 2.15. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi DI Yogyakarta

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	422.546	1.455.455	1.111.152
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	396.301	1.379.241	1.051.594
Rata-rata MPP (000 Rp)	26.245	76.214	59.558
Rasio Marjin (%)	6,62	5,53	5,66

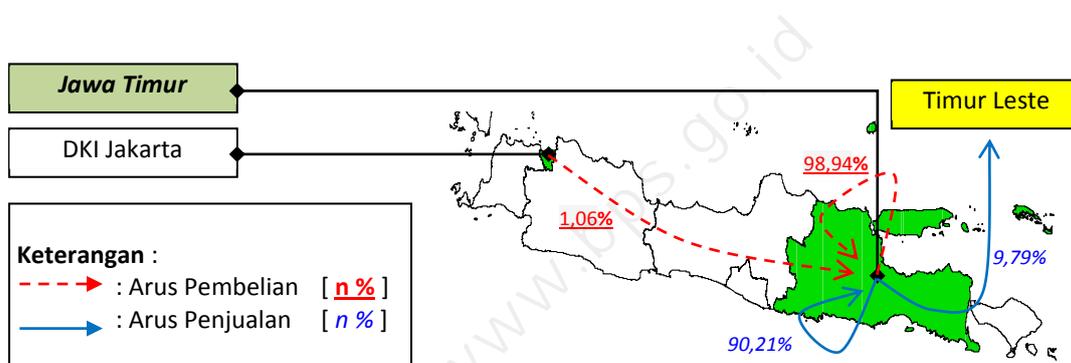
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp26,24 juta dengan rasio marjin sebesar 6,62 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,62 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp76,21 juta dengan rasio marjin sebesar 5,53 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,53 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp59,56 juta dengan rasio marjin sebesar 5,66 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,66 persen.

2.4.15 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pemekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

2.4.15.1 Peta Distribusi

Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Jawa Timur sendiri, yaitu sebesar 98,94 persen. Pasokan susu bubuk lainnya berasal dari Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 1,06 persen. Selanjutnya, sebesar 90,21 persen pasokan tersebut dijual ke wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Sisanya sebanyak 9,79 persen diekspor ke Timor Timur. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



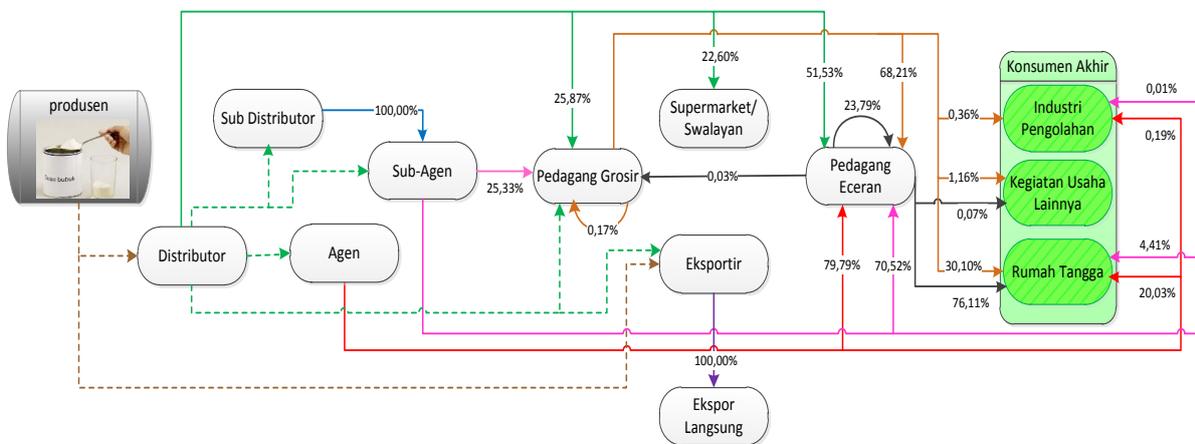
Gambar 31. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jawa Timur

2.4.15.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Jawa Timur melibatkan fungsi usaha distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, eksportir, dan pengecer. Sementara distributor mendapatkan seluruh pasokan dari produsen dan sub distributor memperolehnya dari distributor; agen, sub agen, pedagang grosir, dan pengecer membeli pasokan dari fungsi usaha perdagangan lainnya. Adapun fungsi usaha perdagangan eksportir mendapatkan sebanyak 20 persen pasokannya dari produsen dan 80 persen dari distributor.

Dari sisi penjualan, distributor dan sub distributor menjual pasokannya ke pedagang-pedagang lainnya. Sementara itu, sesuai dengan fungsinya eksportir mengekspor seluruh pasokan susu bubuk ke luar negeri. Adapun fungsi usaha agen, sub agen, pedagang grosir, dan pengecer selain mendistribusikan komoditi ini ke pedagang lainnya juga menjualnya langsung ke konsumen akhir seperti industri pengolahan dan rumah tangga. Selain itu, untuk memenuhi kekurangan stok pedagang grosir mendapatkan sebanyak 0,03 persen pasokan dari pedagang eceran. Pembelian dan penjualan komoditi susu bubuk di Provinsi

Jawa Timur dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta besaran nilai persentasenya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 32. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Jawa Timur

2.4.15.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

Tabel 2.16. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Jawa Timur

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.491.487	229.315	1.518.074
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	3.244.848	216.919	1.413.138
Rata-rata MPP (000 Rp)	246.639	12.395	104.936
Rasio Marjin (%)	7,60	5,71	7,43

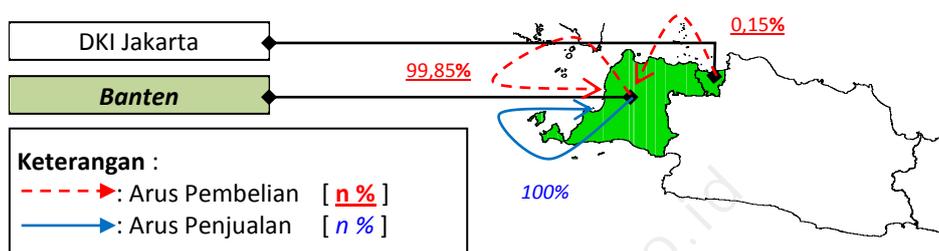
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp246,64 juta dengan rasio marjin sebesar 7,60 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,60 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp12,40 juta dengan rasio marjin sebesar 5,71 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,71 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp104,94 juta dengan rasio marjin sebesar 7,43 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,43 persen.

2.4.16 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Serang.

2.4.16.1 Peta Distribusi

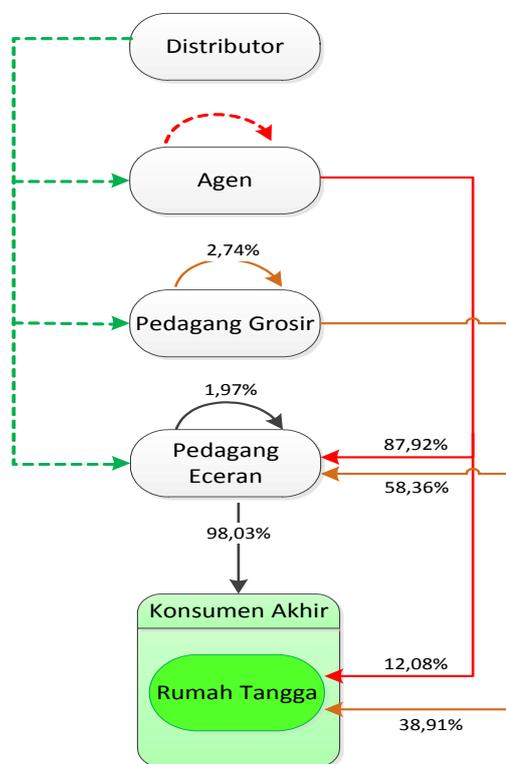
Hasil survei di tingkat pedagang menunjukkan bahwa hampir seluruh susu bubuk yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Banten, yaitu sebesar 99,85 persen, berasal dari dalam wilayah Provinsi Banten sendiri. Sisanya sebesar 0,15 persen dipasok dari Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun 100 persen penjualan adalah untuk konsumsi di dalam Provinsi Banten sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Banten disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 33. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Banten

2.4.16.2 Pola Distribusi

Perdagangan susu bubuk di provinsi Banten melibatkan fungsi usaha distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pendistribusian pasokan dari agen dan pedagang grosir adalah ke pedagang eceran serta ke rumah tangga. Adapun pedagang eceran menjual susu bubuk ke sesama pedagang eceran dan juga ke konsumen akhir rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada gambar di sebelah ini.



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Banten

2.4.16.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Banten sebagai berikut.

Tabel 2.17. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Banten

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	725.919	363.530	524.592
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	692.104	349.159	501.579
Rata-rata MPP (000 Rp)	33.815	14.371	23.013
Rasio Marjin (%)	4,89	4,12	4,59

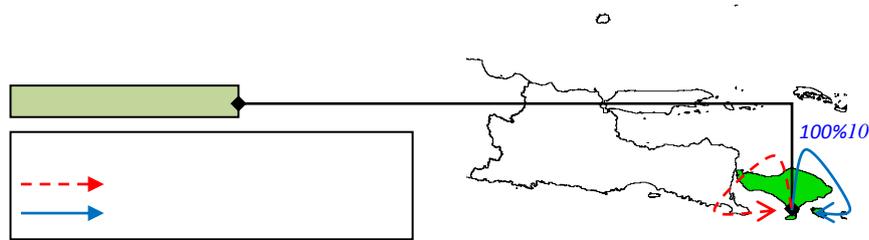
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp33,82 juta dengan rasio marjin sebesar 4,89 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,89 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp14,37 juta dengan rasio marjin sebesar 4,12 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,12 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp23,01 juta dengan rasio marjin sebesar 4,59 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,59 persen.

2.4.17 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karang Asem, dan Kota Denpasar.

2.4.17.1 Peta Distribusi

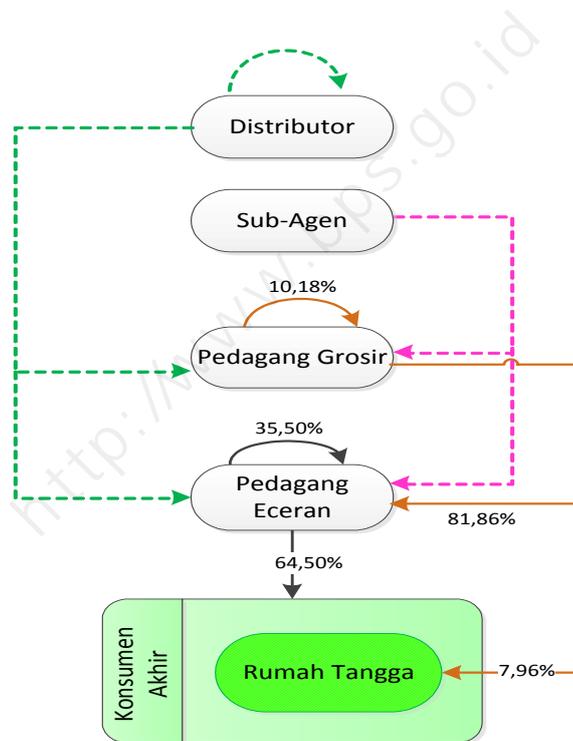
Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Bali menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Bali. Pasokan tersebut kemudian dipasarkan seluruhnya ke dalam Provinsi Bali sendiri, seperti yang digambarkan pada peta berikut ini.



Gambar 35. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Bali

2.4.17.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Bali melibatkan fungsi usaha pedagang grosir dan pedagang eceran. Pembelian pasokan dari kedua fungsi usaha perdagangan tersebut adalah dari fungsi usaha lainnya seperti distributor, sub agen, dan pedagang grosir. Kemudian pasokan dijual ke pedagang lainnya dan juga konsumen akhir rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Bali

2.4.17.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Bali sebagai berikut.

Tabel 2.18. Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP) Susu bubuk di Provinsi Bali

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	71.349	31.711	43.603
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	67.074	29.971	41.102
Rata-rata MPP (000 Rp)	4.274	1.741	2.501
Rasio Marjin (%)	6,37	5,81	6,08

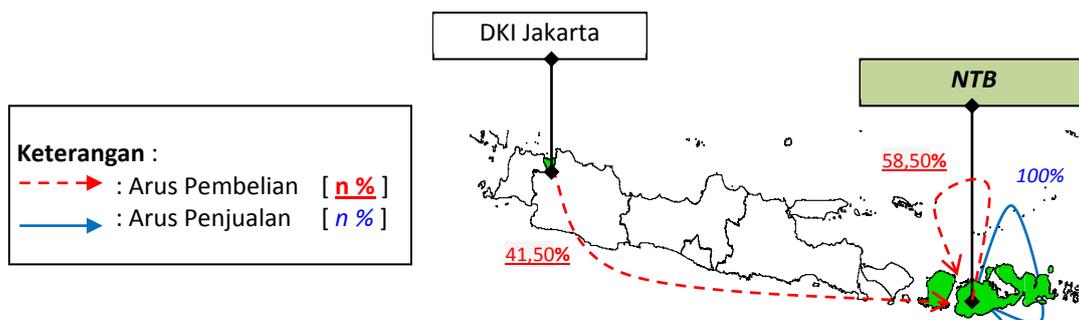
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp4,27 juta dengan rasio marjin sebesar 6,37 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,37 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp1,74 juta dengan rasio marjin sebesar 5,81 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,81 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp2,5 juta dengan rasio marjin sebesar 6,08 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,08 persen.

2.4.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram.

2.4.18.1 Peta Distribusi

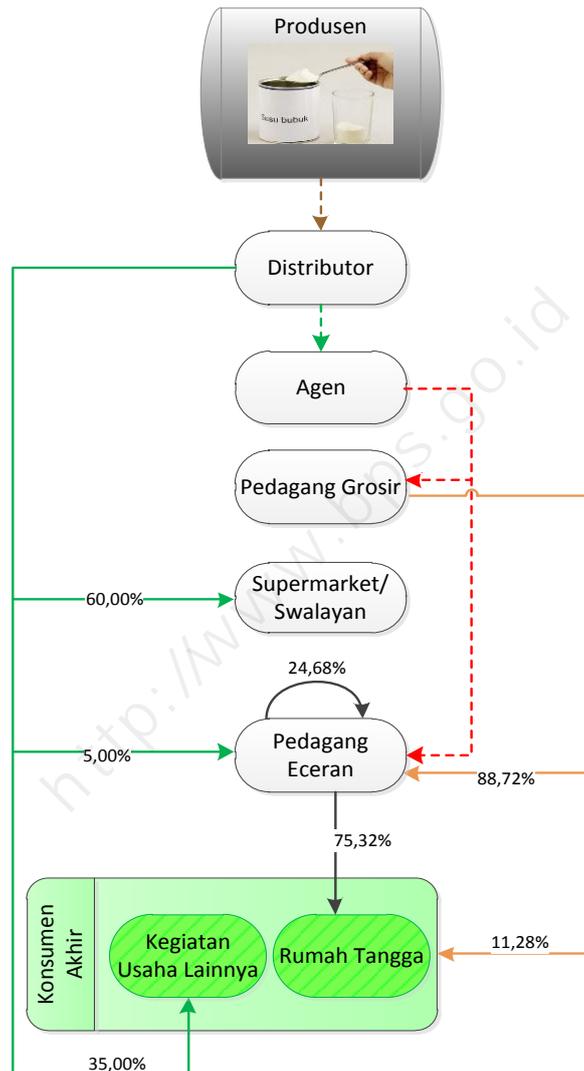
Hasil survei distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa pasokan susu bubuk sebanyak 58,50 persen berasal dari dalam provinsi dan sebanyak 41,50 persen berasal dari luar provinsi. Wilayah pemasok susu bubuk dari luar provinsi adalah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pasokan tersebut sepenuhnya dipasarkan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, seperti yang digambarkan pada peta berikut ini.



Gambar 37. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.4.18.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen, pedagang grosir dan pedagang eceran mendapatkan pasokan sebagian besar dari distributor. Selanjutnya pasokan tersebut dijual ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan juga ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.4.18.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut.

Tabel 2.19. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	721.683	175.128	522.936
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	685.064	171.406	498.280
Rata-rata MPP (000 Rp)	36.619	3.721	24.656
Rasio Marjin (%)	5,35	2,17	4,95

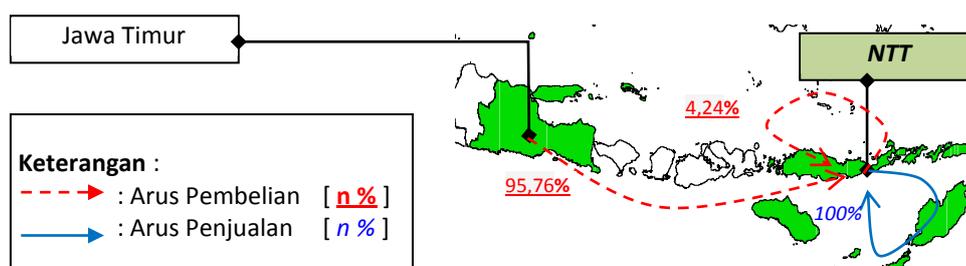
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp36,62 juta dengan rasio marjin sebesar 5,35 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,35 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp3,72 juta dengan rasio marjin sebesar 2,17 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,17 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp24,66 juta dengan rasio marjin sebesar 4,95 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,95 persen.

2.4.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kota Kupang.

2.4.19.1 Peta Distribusi

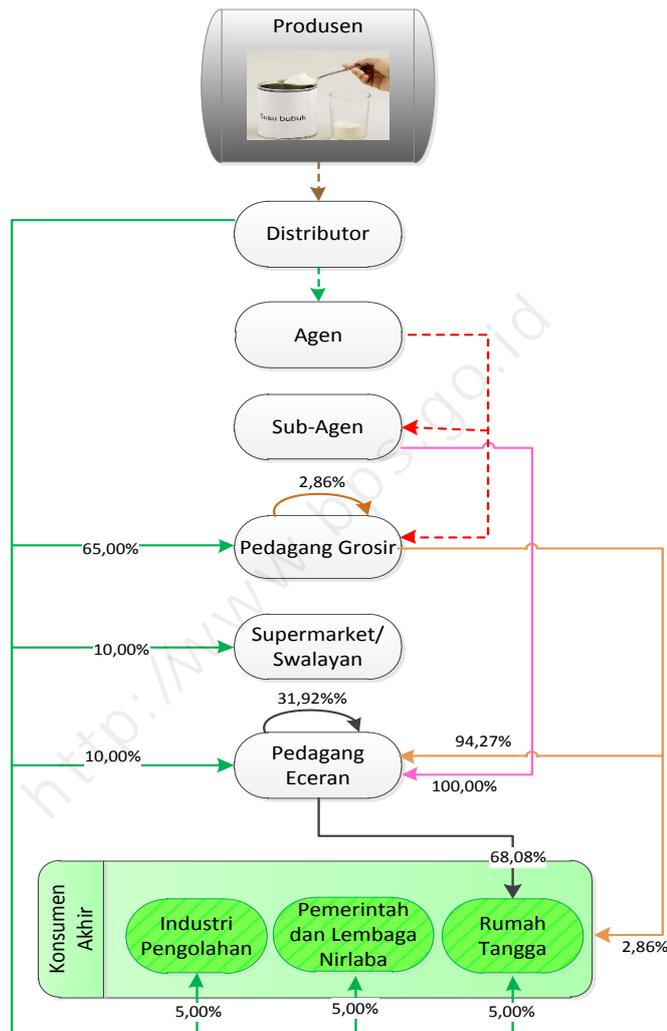
Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk hampir seluruhnya, yakni sebesar 95,76 persen, berasal dari provinsi Jawa Timur. Wilayah pemasok di Provinsi Jawa Timur tersebut adalah Kota Kediri (95,12%) dan Kota Surabaya (0,64%). Selanjutnya pasokan tersebut dipasarkan dan dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, seperti yang digambarkan pada peta berikut ini.



Gambar 39. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.4.19.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan fungsi usaha distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran mendapatkan pasokan dari pedagang fungsi usaha lainnya. Ketiga pelaku usaha perdagangan tersebut kemudian memasarkan dan menjual pasokan ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan juga langsung ke konsumen akhir seperti pemerintah dan lembaga nirlaba serta konsumen rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.4.19.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 2.20. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	523.368	17.669	306.640
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	506.727	16.193	296.498
Rata-rata MPP (000 Rp)	16.641	1.475	10.141
Rasio Marjin (%)	3,28	9,11	3,42

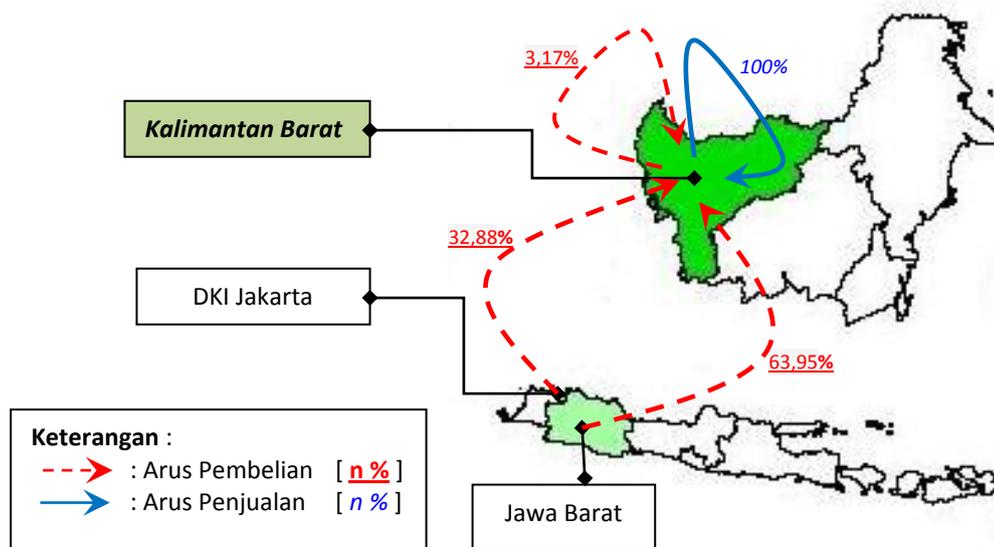
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp16,64 juta dengan rasio marjin sebesar 3,28 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,28 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp1,48 juta dengan rasio marjin sebesar 9,11 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,11 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp10,14 juta dengan rasio marjin sebesar 3,42 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,42 persen.

2.4.20 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

2.4.20.1 Peta Distribusi

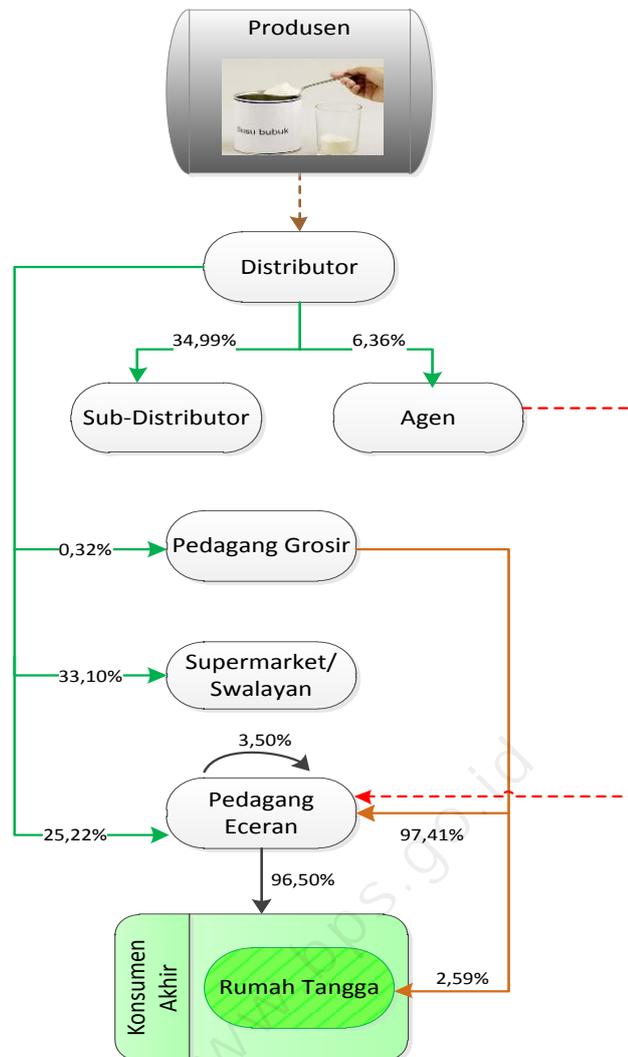
Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebanyak 96,83 persen pasokan susu bubuk di provinsi ini berasal dari luar provinsi. Wilayah pemasok tersebut adalah Kota Bekasi (63,95%) dan Kota Administrasi Jakarta Selatan (32,88%). Sisa pasokan sebanyak 3,17 persen berasal dari dalam provinsi. Pasokan tersebut dipasarkan dan dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 41. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Barat

2.4.20.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan distributor lainnya. Kemudian pasokan tersebut didistribusikan ke fungsi usaha perdagangan lainnya untuk dijual kembali secara grosir maupun secara eceran. Adapun pedagang grosir membeli pasokan susu bubuk sepenuhnya dari distributor, kemudian menjualnya ke pedagang eceran dan konsumen akhir rumah tangga. Penjualan terbesar adalah ke pedagang eceran, yakni sebanyak 94,71 persen. Sementara itu pedagang eceran menjual komoditi ini sebagian besar ke rumah tangga. Pola pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 42. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Barat

2.4.20.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

Tabel 2.21. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	14.971.119	84.022	7.527.570
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	14.637.996	82.719	7.360.358
Rata-rata MPP (000 Rp)	333.123	1.302	167.213
Rasio Marjin (%)	2,28	1,57	2,27

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu

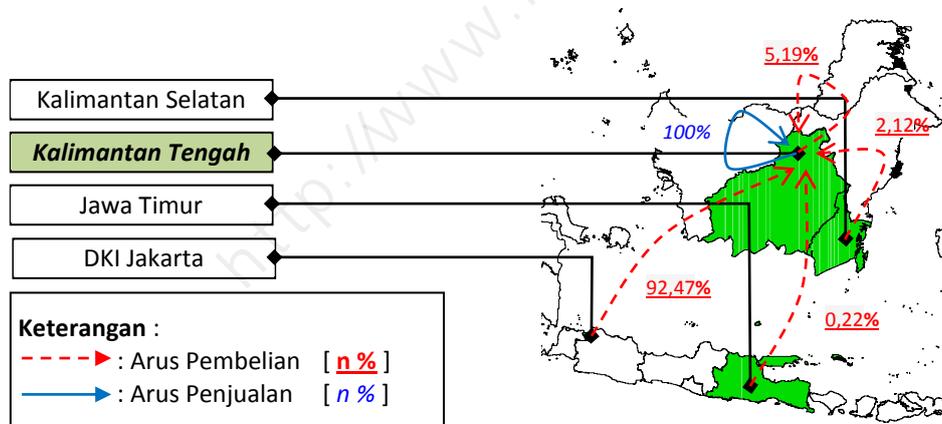
bubuk adalah sekitar Rp333,12 juta dengan rasio margin sebesar 2,28 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,28 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp1,30 juta dengan rasio margin sebesar 1,57 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,57 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp167,21 juta dengan rasio margin sebesar 2,27 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,27 persen.

2.4.21 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangkaraya.

2.4.21.1 Peta Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 92,47 persen pasokan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kota Surabaya juga turut menjadi wilayah pemasok susu bubuk ke provinsi ini, yakni sebanyak 0,22 persen. Sedangkan sisa pasokan sebanyak 7,32 persen diperoleh dari wilayah kabupaten/kota dari dalam provinsi. Seluruh pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

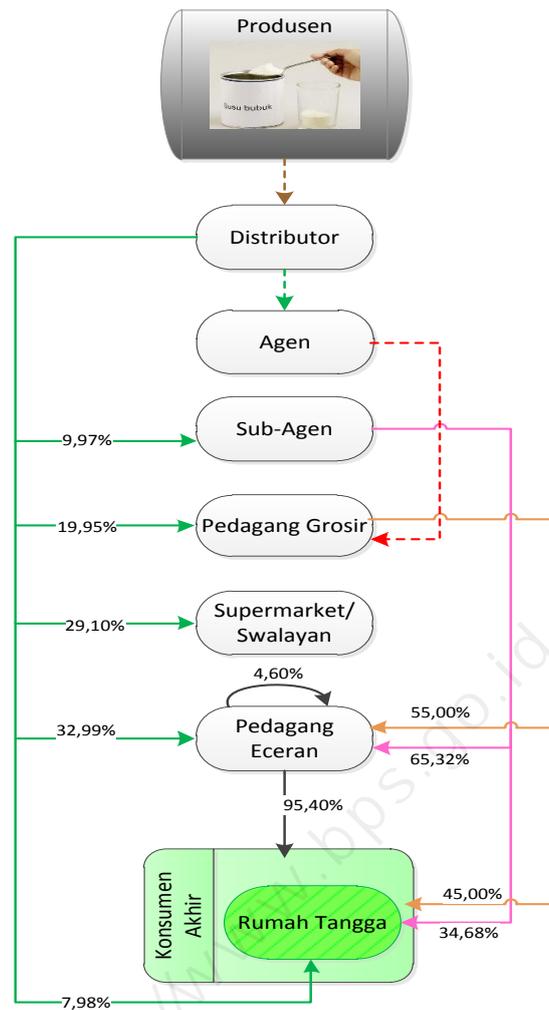


Gambar 43. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Tengah

2.4.21.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen kemudian menjualnya ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara itu sub agen membeli pasokan dari distributor. Penjualan komoditas dari sub agen adalah ke pedagang eceran dan rumah tangga. Adapun pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan

lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 44. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Tengah

2.4.21.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.22. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.043.718	107.945	762.986
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.033.113	103.303	754.170
Rata-rata MPP (000 Rp)	10.605	4.641	8.816
Rasio Marjin (%)	1,03	4,49	1,17

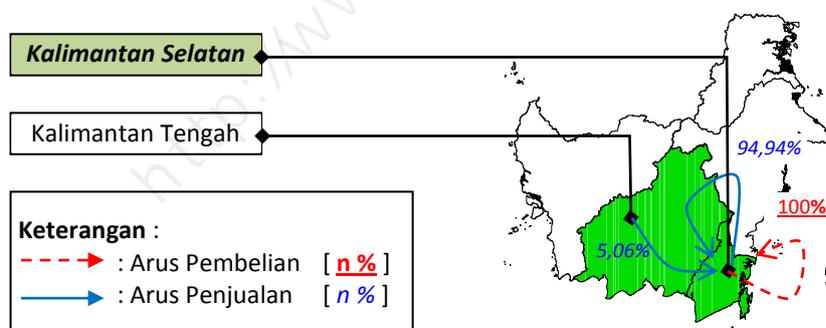
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp10,61 juta dengan rasio margin sebesar 1,03 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,03 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp4,64 juta dengan rasio margin sebesar 4,49 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,49 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp8,82 juta dengan rasio margin sebesar 1,17 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,17 persen.

2.4.22 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

2.4.22.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Selatan seluruhnya berasal dari dalam provinsi. Pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah kabupaten/kota di dalam dan luar provinsi. Penjualan ke dalam provinsi adalah sebesar 94,94 persen, sedangkan penjualan ke luar provinsi adalah sebanyak sisanya yakni 5,06 persen ke Kabupaten Kapuas. Peta distribusi perdagangan disajikan sebagai berikut.

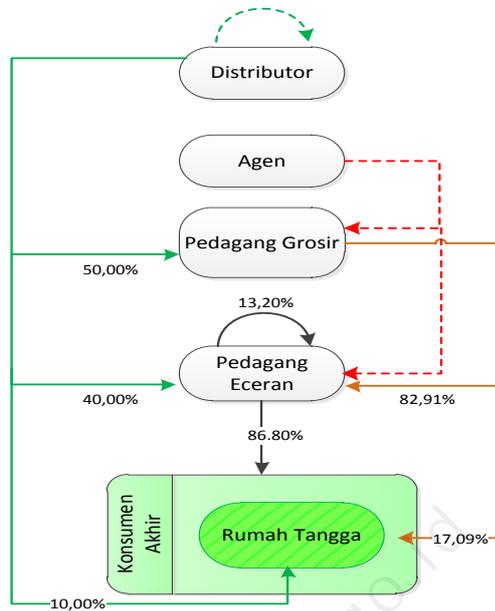


Gambar 45. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Selatan

2.4.22.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan dari sesama distributor. Pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke fungsi usaha perdagangan lainnya untuk dijual kembali secara grosir maupun secara eceran. Distributor pun menjual sebagian kecil komoditi ini langsung ke konsumen akhir rumah tangga, yakni sebanyak 10,00 persen. Sementara itu pedagang grosir membeli pasokan susu bubuk dari distributor dan agen. Adapun pedagang eceran mendapatkan sepenuhnya

pasokan dari agen. Pedagang grosir dan pedagang eceran tersebut kemudian menjual pasokannya ke pedagang eceran dan konsumen akhir rumah tangga. Pola pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 46. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Selatan

2.4.22.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.23. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Selatan

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	457.590	29.329	379.725
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	447.327	27.336	370.965
Rata-rata MPP (000 Rp)	10.263	1.993	8.759
Rasio Marjin (%)	2,29	7,29	2,36

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp10,26 juta dengan rasio marjin sebesar 2,29 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,29 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp1,99 juta dengan rasio marjin sebesar 7,29 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 7,29 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan

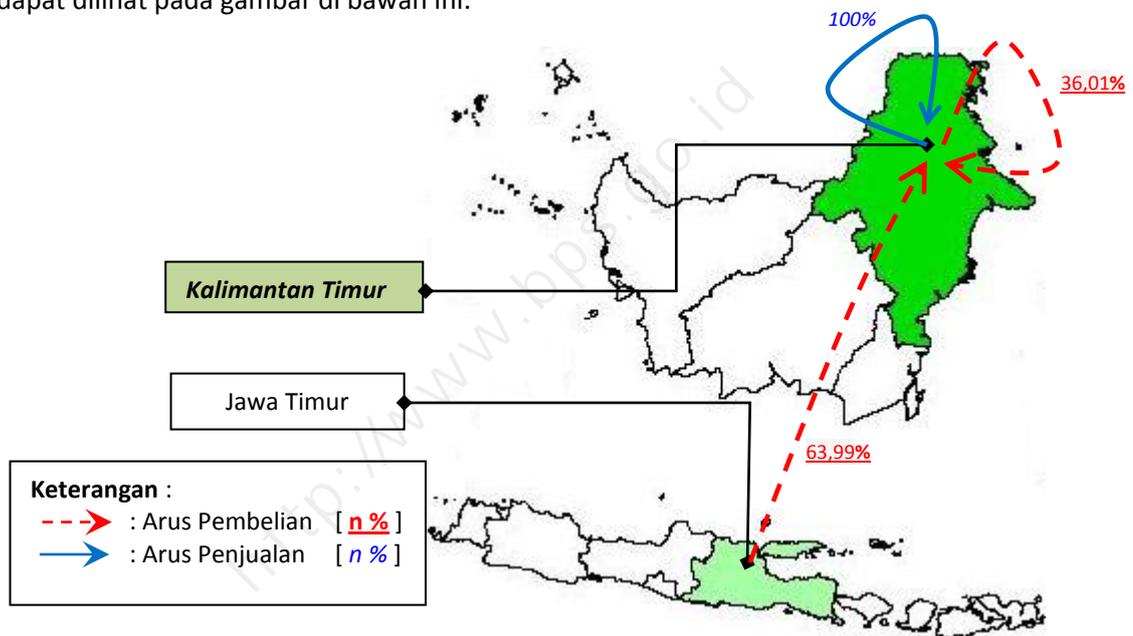
pedagang eceran adalah sekitar Rp8,76 juta dengan rasio margin sebesar 2,36 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,36 persen.

2.4.23 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

2.4.23.1 Peta Distribusi

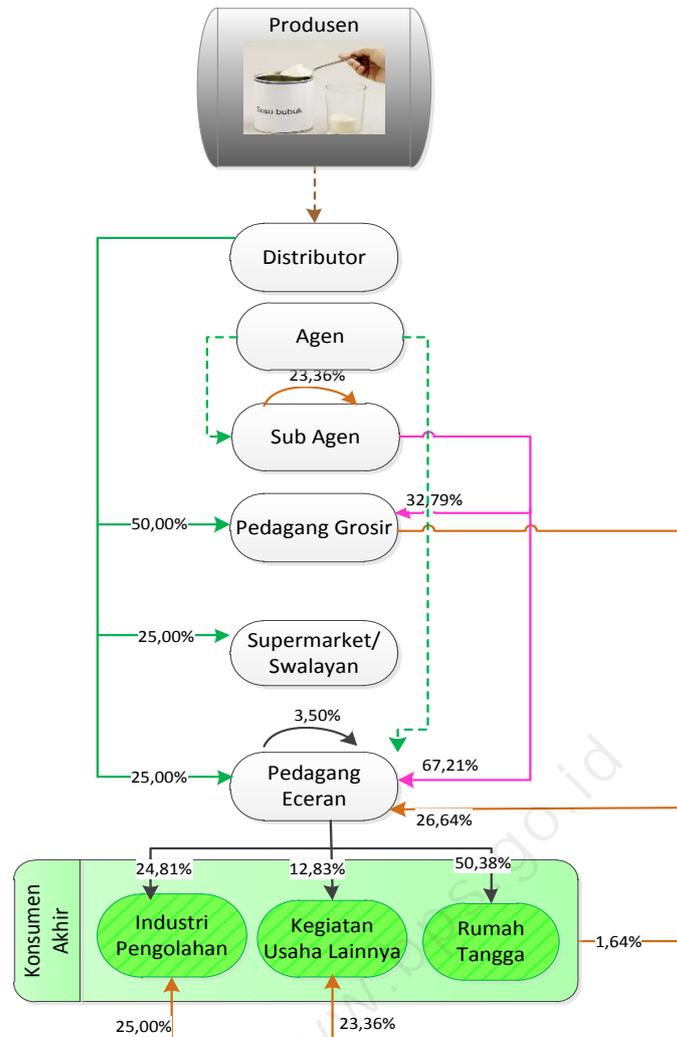
Hasil survei menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk tidak berasal dari dalam Provinsi Kalimantan Timur saja. Sebanyak 63,99 persen pasokan sebagian besar diperoleh dari Provinsi Jawa Timur, yakni dari Kota Surabaya. Sisanya diperoleh dari dalam provinsi. Semua susu bubuk tersebut kemudian seluruhnya dijual ke dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 47. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Timur

2.4.23.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen kemudian mendistribusikannya ke fungsi usaha perdagangan lainnya untuk dijual secara grosir maupun eceran. Sementara itu sub agen membeli pasokan dari agen dan sesama sub agen. Adapun pedagang grosir mendapatkan pasokan seluruhnya dari distributor, sedangkan pedagang eceran selain memperoleh susu bubuk dari distributor juga memperolehnya dari agen. Pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 48. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Timur

2.4.23.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

Tabel 2.24. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.104.322	28.620	700.934
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.073.256	27.997	681.284
Rata-rata MPP (000 Rp)	31.066	623	19.650
Rasio Marjin (%)	2,89	2,23	2,88

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu

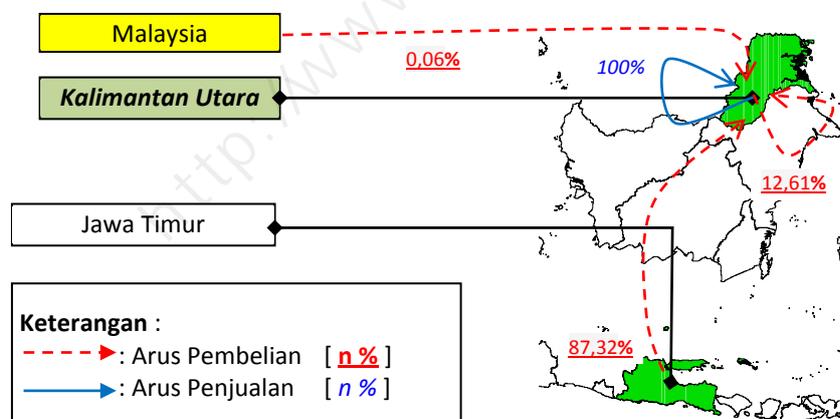
bubuk adalah sekitar Rp31,07 juta dengan rasio margin sebesar 2,89 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,89 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp623.000 dengan rasio margin sebesar 2,23 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,23 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp19,65 juta dengan rasio margin sebesar 2,88 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,88 persen.

2.4.24 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

2.4.24.1 Peta Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa asal pasokan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Utara berasal dari dalam provinsi, luar provinsi, dan luar negeri. Wilayah pemasok dari dalam provinsi adalah Kota Tarakan dan Nunukan, sedangkan wilayah pemasok dari luar provinsi adalah Kota Surabaya. Adapun negara lain pemasok susu bubuk di provinsi ini adalah Malaysia. Susu bubuk tersebut kemudian seluruhnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

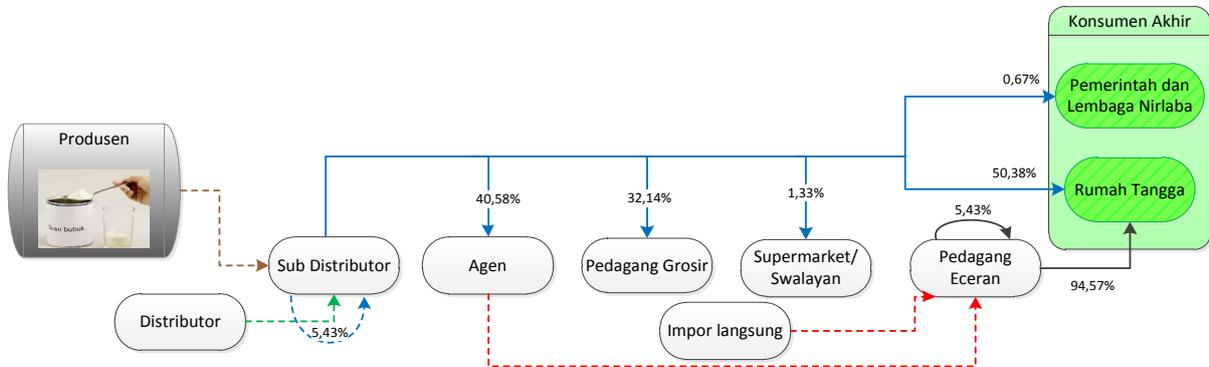


Gambar 49. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Utara

2.4.24.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan sub distributor dan pedagang eceran. Sub distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen, distributor, dan sesama sub distributor. Kemudian mendistribusikannya ke fungsi usaha perdagangan lainnya untuk dijual secara grosir maupun eceran. Tidak hanya itu, fungsi usaha ini juga mendistribusikan komoditi

susu bubuk langsung ke konsumen akhir. Sementara itu pedagang eceran mendapatkan pasokan dengan mengimpor langsung dan membelinya dari agen. Pedagang eceran tersebut kemudian menjual sebagian besar ke rumah tangga dan sebagian kecil ke sesama pedagang eceran. Pola pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 50. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Utara

2.4.24.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut.

Tabel 2.25. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.782.567	20.412	1.901.489
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	3.674.156	19.213	1.846.685
Rata-rata MPP (000 Rp)	108.410	1.198	54.804
Rasio Marjin (%)	2,95	6,24	2,97

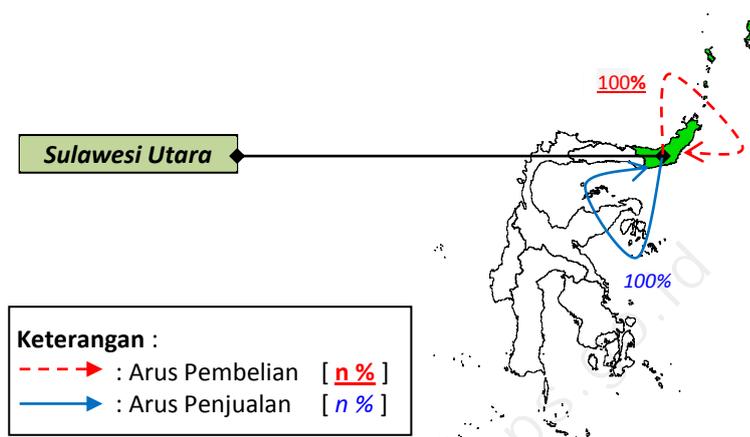
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp108,41 juta dengan rasio marjin sebesar 2,95 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,95 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp1,2 juta dengan rasio marjin sebesar 6,24 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,24 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp54,80 juta dengan rasio marjin sebesar 2,97 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,97 persen.

2.4.25 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado, dan Kota Bitung.

2.4.25.1 Peta Distribusi

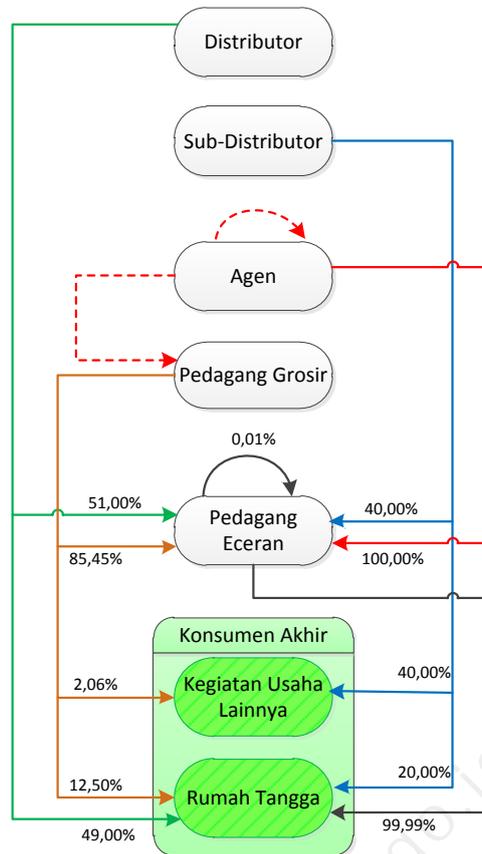
Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Utara seluruhnya diperoleh dari dalam provinsi dan dijual ke wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 51. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Utara

2.4.25.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan fungsi usaha distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir dan juga pedagang eceran. Sementara agen mendistribusikan seluruh pasokan ke pedagang eceran, pelaku usaha lainnya menjual komoditas susu bubuk ini ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan juga langsung ke konsumen akhir. Pembelian dan penjualan komoditi susu bubuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap pelaku usaha perdagangan beserta nilai persentasenya secara lengkap digambarkan pada pola di bawah ini:



Gambar 52. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Utara

2.4.25.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

Tabel 2.26. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	18.224	8.859.150	1.786.409
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	16.715	8.738.250	1.761.022
Rata-rata MPP (000 Rp)	1.509	120.900	25.387
Rasio Marjin (%)	9,03	1,38	1,44

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp1,51 juta dengan rasio marjin sebesar 9,03 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 9,03 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp120,90 juta dengan rasio marjin sebesar 1,38

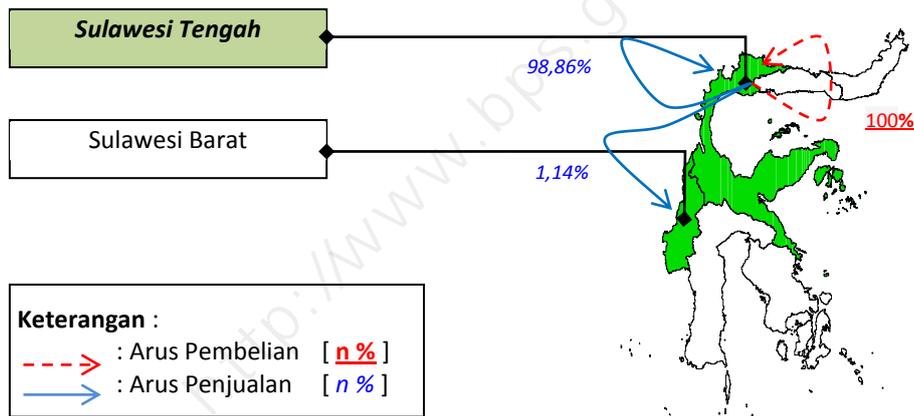
persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,38 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp25,39 juta dengan rasio marjin sebesar 1,44 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 1,44 persen.

2.4.26 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk adalah Kota Palu.

2.4.26.1 Peta Distribusi

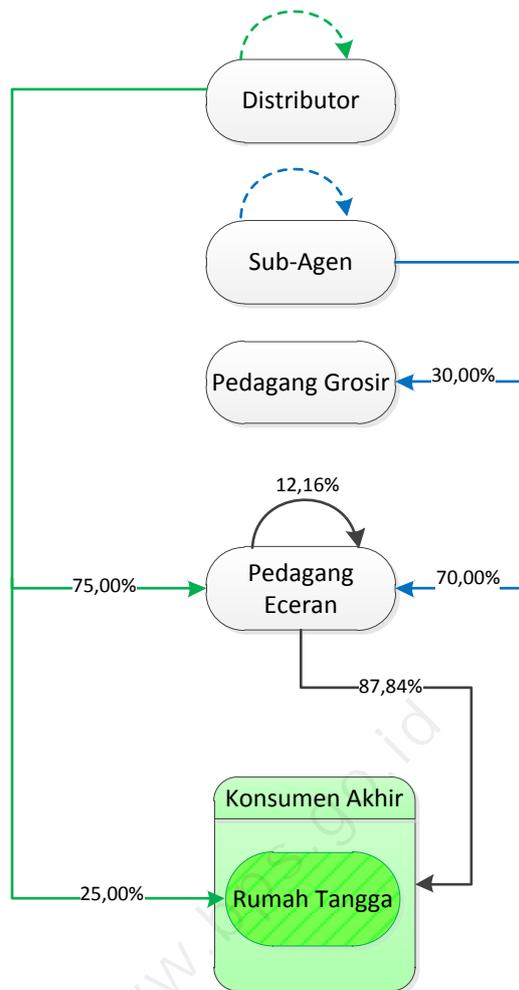
Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 18,87 persen pasokan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Utara berasal dari Kota Surabaya, sisanya sebanyak 81,13 persen diperoleh dari wilayah di dalam provinsi yaitu Kota Palu. Kemudian pasokan tersebut seluruhnya dijual ke wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 53. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Tengah

2.4.26.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan fungsi usaha distributor, sub agen, dan pedagang eceran. Distributor memperoleh pasokan komoditas dari sesama distributor. Kemudian mendistribusikan pasokan tersebut sebagian besar ke pedagang eceran dan sebagian kecil ke konsumen akhir rumah tangga. Sementara itu sub agen mendapatkan pasokan dari agen. Pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Porsi terbesar penjualan dari sub agen adalah ke pedagang eceran, yakni sebanyak 70 persen.



Gambar 54. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Tengah

Fungsi usaha pedagang eceran mendapatkan pasokan susu bubuk dari sesama pedagang eceran dan fungsi usaha perdagangan lainnya. Kemudian sebagian kecil pasokan tersebut dijual ke sesama pedagang eceran dan sebagian besar ke konsumen akhir rumah tangga. Pembelian dan penjualan komoditi susu bubuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk setiap pelaku usaha perdagangan beserta nilai persentasenya secara lengkap disajikan pada Gambar 54.

2.4.26.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.27. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	567.480	57.310	312.395
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	499.560	54.402	276.981
Rata-rata MPP (000 Rp)	67.920	2.908	35.414
Rasio Marjin (%)	13,60	5,35	12,79

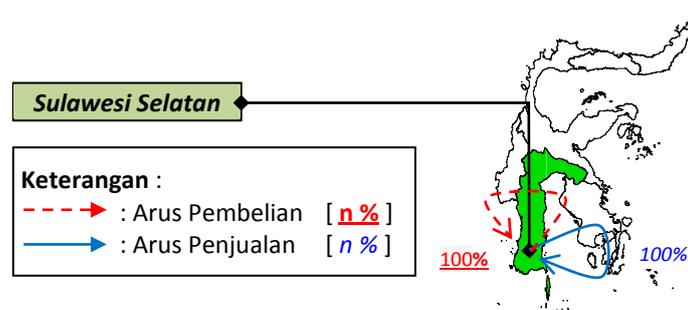
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp67,92 juta dengan rasio marjin sebesar 13,60 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 13,60 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp2,91 juta dengan rasio marjin sebesar 5,35 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,35 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp35,41 juta dengan rasio marjin sebesar 12,79 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 12,79 persen.

2.4.27 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, dan Kota Palopo.

2.4.27.1 Peta Distribusi

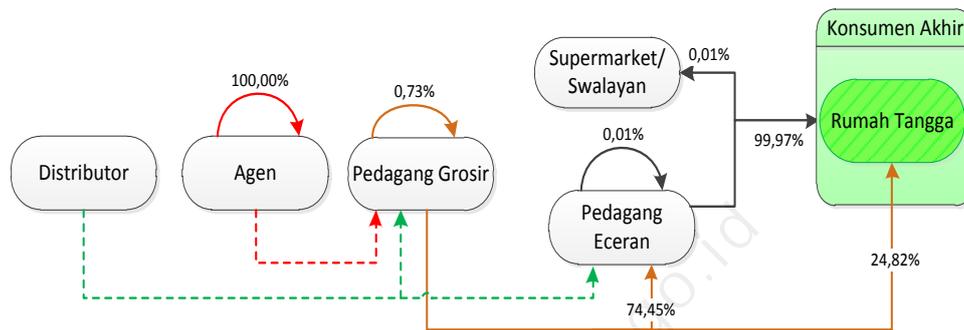
Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Selatan seluruhnya diperoleh dari dalam provinsi dan dijual ke wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Wilayah pemasok sekaligus pengonsumsi susu bubuk terbesar adalah Kota Makassar. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 55. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Selatan

2.4.27.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan fungsi usaha agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara agen memperoleh pasokan seluruhnya dari sesama agen, pedagang grosir mendapatkannya dari distributor dan agen. Adapun pedagang eceran membeli pasokan dari beberapa fungsi usaha perdagangan lain termasuk dari sesama pedagang eceran. Dari sisi penjualan, agen mendistribusikan komoditi ini seluruhnya ke sesama agen. Sedangkan pedagang grosir dan pedagang eceran mendistribusikannya ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan juga langsung ke konsumen akhir. Pembelian dan penjualan komoditi susu bubuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk setiap pelaku usaha perdagangan beserta nilai persentasenya secara lengkap digambarkan pada pola di bawah ini:



Gambar 56. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Selatan

2.4.27.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.28. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	379.401	63.811	233.744
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	368.962	62.102	227.335
Rata-rata MPP (000 Rp)	10.439	1.709	6.410
Rasio Marjin (%)	2,83	2,75	2,82

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp10,44 juta dengan rasio marjin sebesar 2,83 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,83 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang

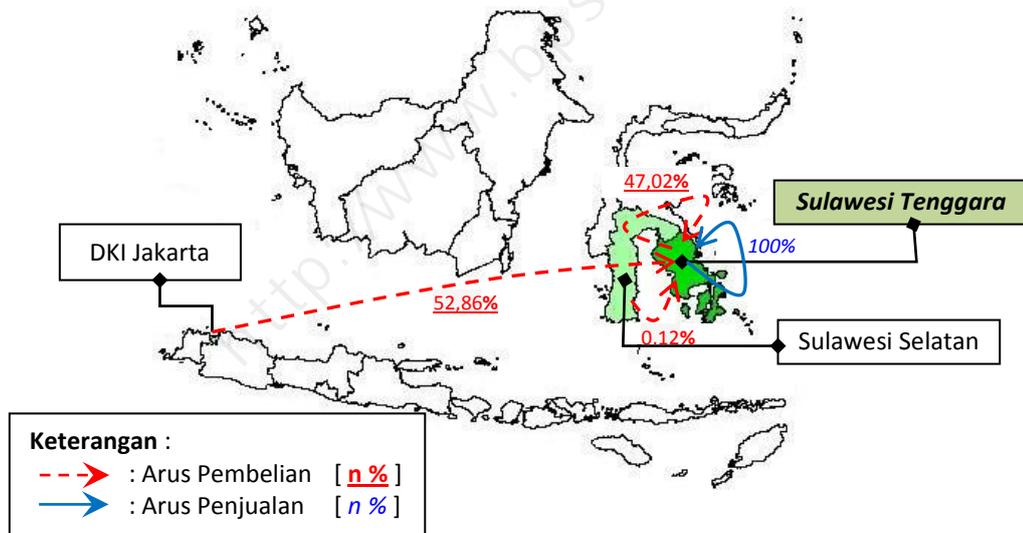
eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp1,71 juta dengan rasio margin sebesar 2,75 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,75 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp6,41 juta dengan rasio margin sebesar 2,82 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,82 persen.

2.4.28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Kendari dan Kota Baubau.

2.4.28.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa asal pasokan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari wilayah di dalam dan dari luar provinsi. Pasokan yang diperoleh dari luar provinsi adalah dari Provinsi DKI Jakarta (52,86%) dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (0,12%). Susu bubuk tersebut kemudian didistribusikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar di bawah ini:

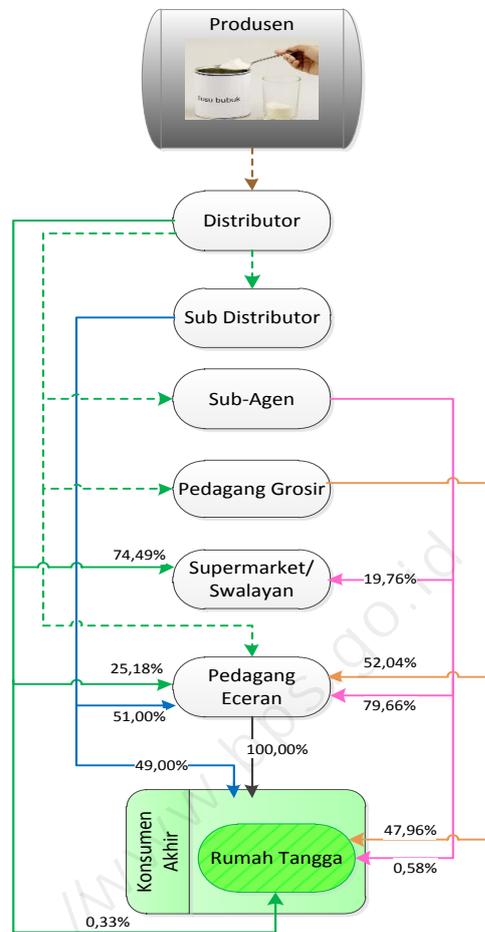


Gambar 57. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.4.28.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan distributor, sub distributor, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan dari sesama distributor sendiri. Pasokan tersebut kemudian dijual ke pedagang-pedagang eceran, supermarket dan pengecer langsung, serta ke konsumen akhir rumah tangga. Sementara itu

sub distributor membeli pasokan dari distributor kemudian mengalokasikan barang dagangannya ke pengecer langsung dan konsumen akhir rumah tangga. Adapun pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan lainnya beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 58. Pola Penjualan Produksi Susu bubuk di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.4.28.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut.

Tabel 2.29. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Tenggara

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	3.420.189	775.144	2.891.180
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	2.523.085	757.781	2.170.024
Rata-rata MPP (000 Rp)	897.104	17.363	721.156
Rasio Marjin (%)	35,56	2,29	33,23

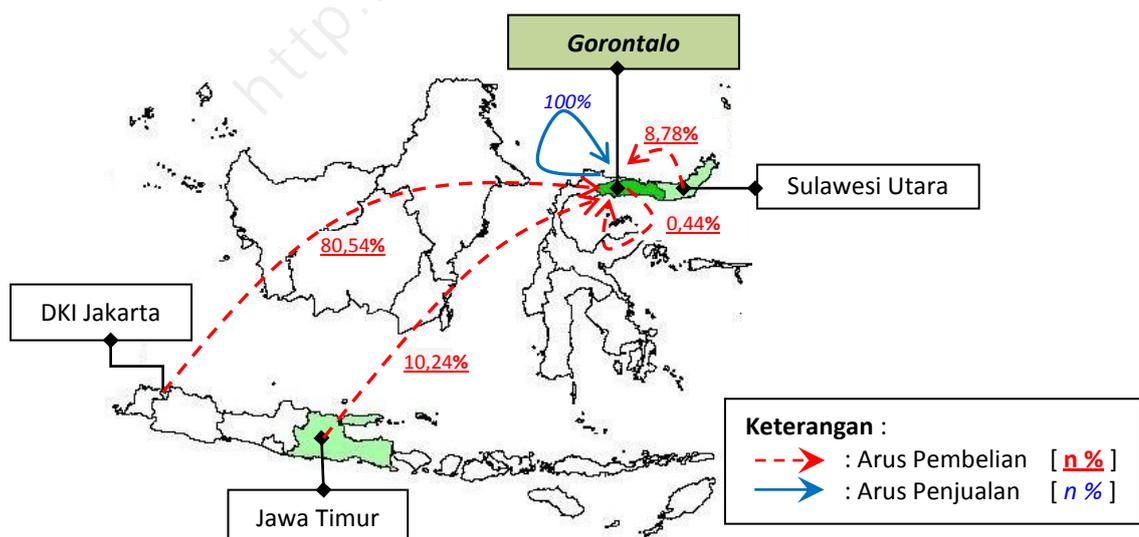
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp897,1 juta dengan rasio margin sebesar 35,56 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 35,56 persen. Rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp17,36 juta dengan rasio margin sebesar 2,29 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,29 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp721,16 juta dengan rasio margin sebesar 33,23 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 33,23 persen.

2.4.29 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

2.4.29.1 Peta Distribusi

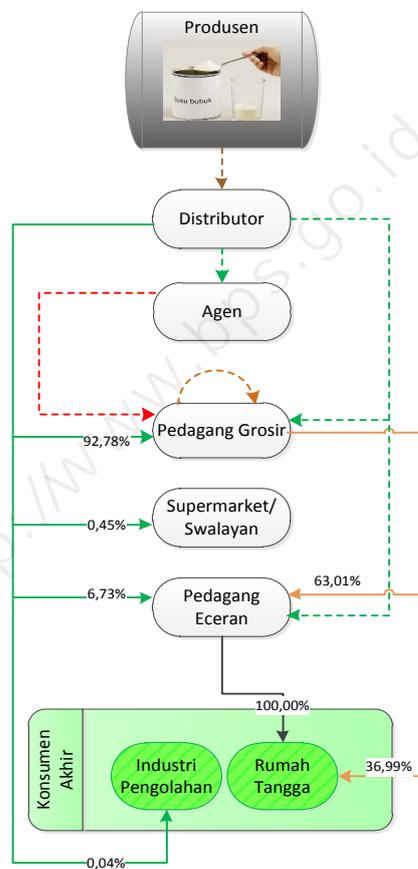
Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa hampir seluruh pasokan susu bubuk di Provinsi Gorontalo berasal dari luar provinsi. Pasokan yang berasal dari dalam provinsi hanya sebesar 0,44 persen. Wilayah-wilayah pemasok dari luar provinsi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur (80,54%), Kota Surabaya (10,24%), dan Kota Manado (8,78%). Pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Peta distribusi perdagangan disajikan sebagai berikut.



Gambar 59. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Gorontalo

2.4.29.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Gorontalo melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan distributor lainnya. Kemudian pasokan tersebut didistribusikan ke fungsi usaha perdagangan lainnya untuk dijual kembali secara grosir maupun secara eceran. Tak hanya itu, distributor juga memasok susu bubuk ke konsumen akhir, yakni industri pengolahan. Adapun pedagang grosir membeli pasokan susu bubuk distributor, agen, dan pedagang grosir lainnya. Pasokan tersebut kemudian dijual ke pedagang eceran dan konsumen akhir rumah tangga. Penjualan terbesar adalah ke pedagang eceran, yakni sebanyak 63,01 persen. Sementara itu pedagang eceran mendapatkan pasokan seluruhnya dari distributor dan menjual komoditi ini seluruhnya ke konsumen akhir rumah tangga. Pola pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 60. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Gorontalo

2.4.29.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut.

Tabel 2.30. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk
di Provinsi Gorontalo

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	23.838.985	178.880	20.881.472
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	23.169.419	172.640	20.294.821
Rata-rata MPP (000 Rp)	669.566	6.240	586.650
Rasio Marjin (%)	2,89	3,61	2,89

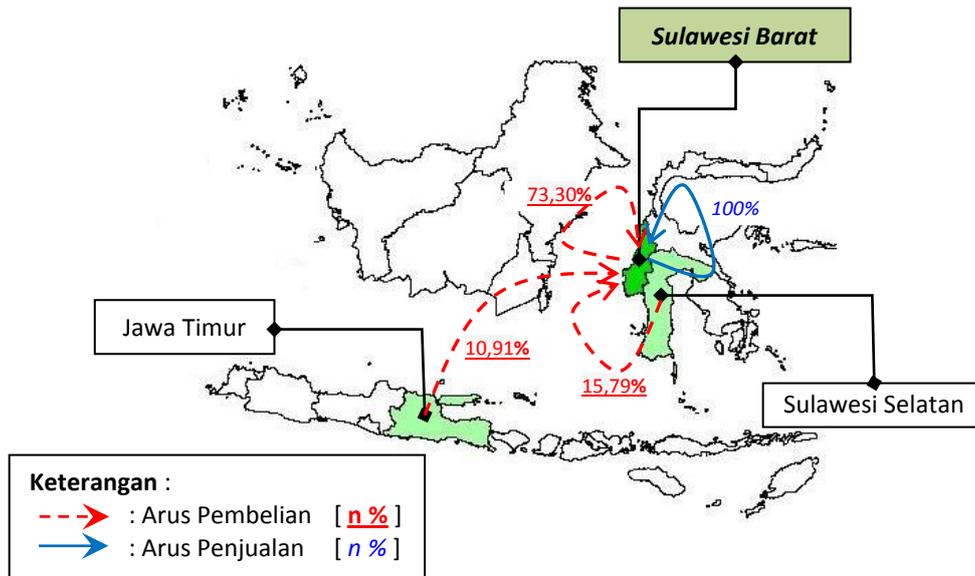
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp669,57 juta dengan rasio marjin sebesar 2,89 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,89 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp6,24 juta dengan rasio marjin sebesar 3,61 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 3,61 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp586,65 juta dengan rasio marjin sebesar 2,89 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,89 persen.

2.4.30 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju.

2.4.30.1 Peta Distribusi

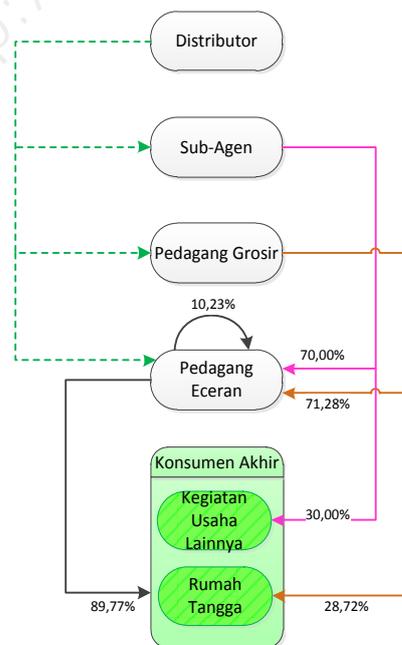
Hasil survei distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa pasokan susu bubuk tidak berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Barat saja. Sebanyak 73,30 persen pasokan berasal dari Kabupaten/kota di dalam provinsi dan sisanya sebanyak 26,70 persen berasal dari Kabupaten/kota di provinsi lain, yaitu Kota Surabaya dan Kota Makassar. Penjualan pasokan seluruhnya adalah ke wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Peta distribusi perdagangan disajikan sebagai berikut.



Gambar 61. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Barat

2.4.30.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa fungsi usaha perdagangan susu bubuk di Provinsi Sulawesi Barat adalah sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sementara sub agen mendapatkan pasokan dari distributor, pedagang eceran membeli pasokannya dari beberapa fungsi usaha perdagangan lainnya seperti distributor, sub agen, dan pedagang eceran lainnya. Dari sisi penjualan, ketiga fungsi usaha perdagangan tersebut mendistribusikan komoditas ini ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Nilai besaran penjualan dari setiap fungsi usaha perdagangan digambarkan pada pola distribusi di bawah ini:



Gambar 62. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Barat

2.4.30.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.

Tabel 2.31. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	88.459	82.975	84.470
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	83.392	64.132	69.385
Rata-rata MPP (000 Rp)	5.067	18.842	15.085
Rasio Marjin (%)	6,08	29,38	21,74

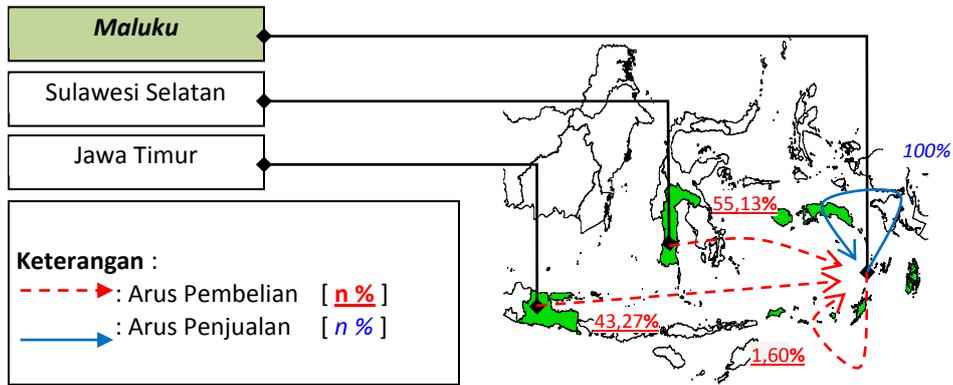
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp5,07 juta dengan rasio marjin sebesar 6,08 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 6,08 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp18,84 juta dengan rasio marjin sebesar 29,38 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 29,38 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp15,08 juta dengan rasio marjin sebesar 21,74 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 21,74 persen.

2.4.31 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kota Ambon dan Kota Tual.

2.4.31.1 Peta Distribusi

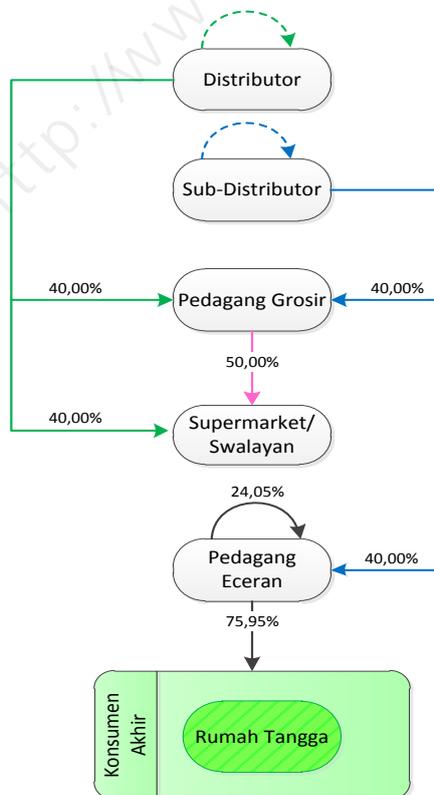
Seperti halnya Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku memasok sebagian besar komoditi susu bubuk dari Kota Surabaya dan Kota Makassar. Pasokan yang diperoleh dari wilayah di dalam provinsi hanya sebesar 1,60 persen. Seluruh pasokan tersebut kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Provinsi Maluku. Kota Ambon merupakan wilayah pendistribusian terbesar dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 63. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Maluku

2.4.31.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa distributor, sub distributor, dan pedagang eceran merupakan fungsi usaha yang terlibat dalam pendistribusian komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku. Ketiga fungsi usaha tersebut mendapatkan pasokan dari distributor. Sementara itu dari sisi penjualan, distributor dan sub distributor menjual pasokannya ke fungsi usaha perdagangan lainnya, yakni pedagang grosir, supermarket, dan pedagang eceran. Adapun pedagang eceran menjual komoditi ini ke sesama pengecer dan konsumen akhir rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 64. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Maluku

2.4.31.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Maluku sebagai berikut.

Tabel 2.32. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Maluku

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.126.566	97.579	440.575
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	1.065.731	78.089	407.303
Rata-rata MPP (000 Rp)	60.835	19.490	33.272
Rasio Marjin (%)	5,71	24,96	8,17

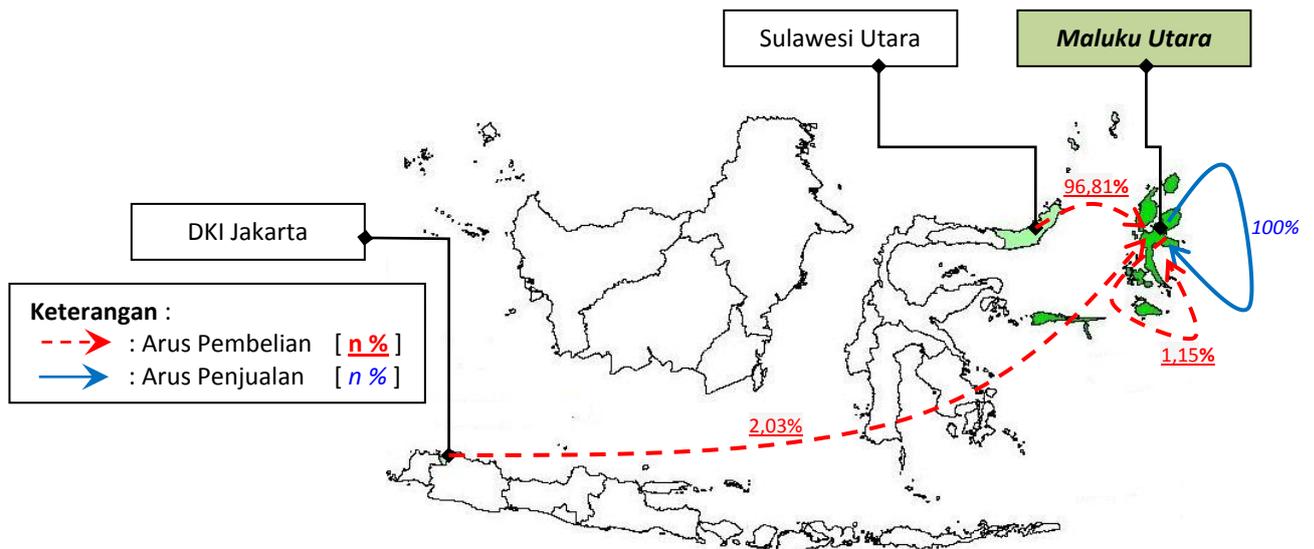
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang besar (PB) susu bubuk adalah sekitar Rp60,84 juta dengan rasio marjin sebesar 5,71 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,71 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori pedagang eceran (PE) susu bubuk adalah sekitar Rp19,49 juta dengan rasio marjin sebesar 24,96 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 24,96 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp33,27 juta dengan rasio marjin sebesar 8,17 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 8,17 persen.

2.4.32 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

2.4.32.1 Peta Distribusi

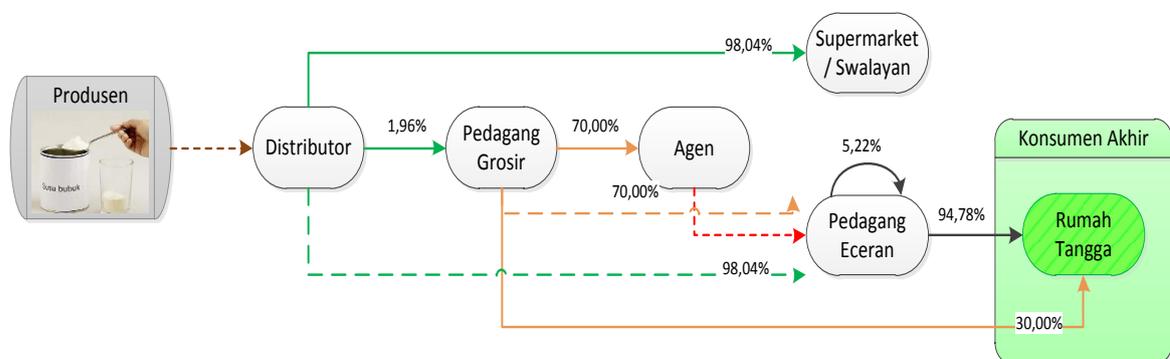
Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa sebanyak 96,81 persen pasokan komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku Utara diperoleh dari wilayah di luar provinsi yakni Kota Manado. Sebanyak 2,03 persen pasokan juga diperoleh dari wilayah di luar provinsi, yakni dari Provinsi DKI Jakarta. Pasokan yang diperoleh dari dalam provinsi adalah sebesar 1,15 persen. Seluruh pasokan tersebut kemudian didistribusikan ke kabupaten/kota di dalam provinsi. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 65. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Maluku Utara

2.4.32.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran merupakan fungsi usaha yang terlibat dalam pendistribusian komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku Utara. Distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen dan distributor lainnya. Pasokan tersebut kemudian dijual ke fungsi usaha perdagangan lainnya, berupa pedagang grosir maupun eceran. Adapun pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari distributor menjual sebagian komoditi ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan konsumen akhir, dengan porsi pendistribusian ke konsumen akhir lebih kecil. Sementara itu pedagang eceran yang mendapatkan pasokan dari distributor, agen, dan pedagang grosir, mendistribusikan komoditi ini sebagian besar ke konsumen akhir rumah tangga dan sebagian kecil ke pedagang eceran lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 66. Pola Penjualan Produksi Susu bubuk di Provinsi Maluku Utara

2.4.32.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut.

Tabel 2.33. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Maluku Utara

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	30.851.063	35.469	9.280.147
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	18.426.593	28.703	5.548.070
Rata-rata MPP (000 Rp)	12.424.470	6.766	3.732.077
Rasio Marjin (%)	67,43	23,57	67,27

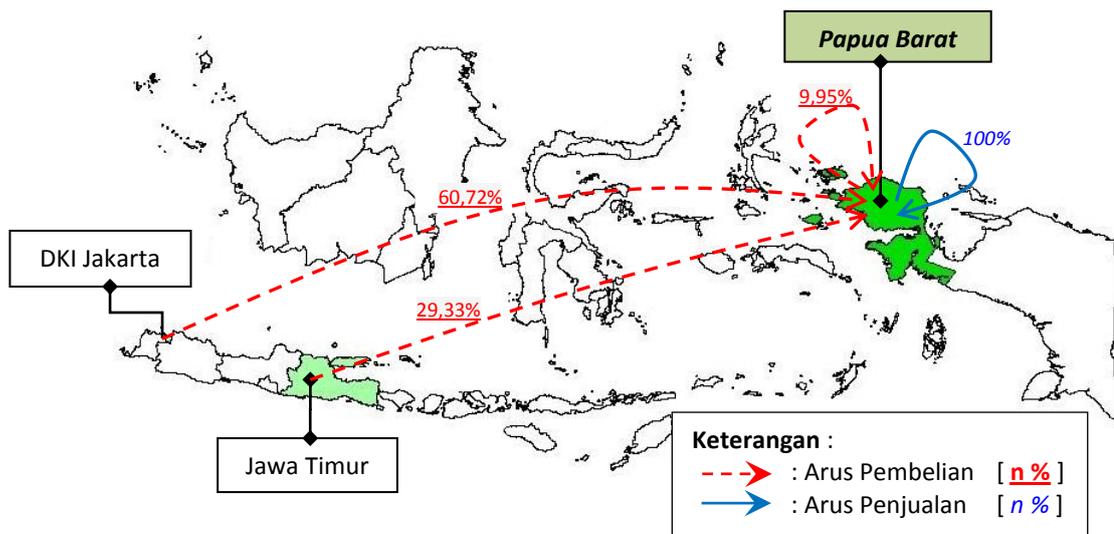
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp12,42 miliar dengan rasio marjin sebesar 67,43 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 67,43 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp6,77 juta dengan rasio marjin sebesar 23,57 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 23,57 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp3,73 miliar dengan rasio marjin sebesar 67,27 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 67,27 persen.

2.4.33 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

2.4.33.1 Peta Distribusi

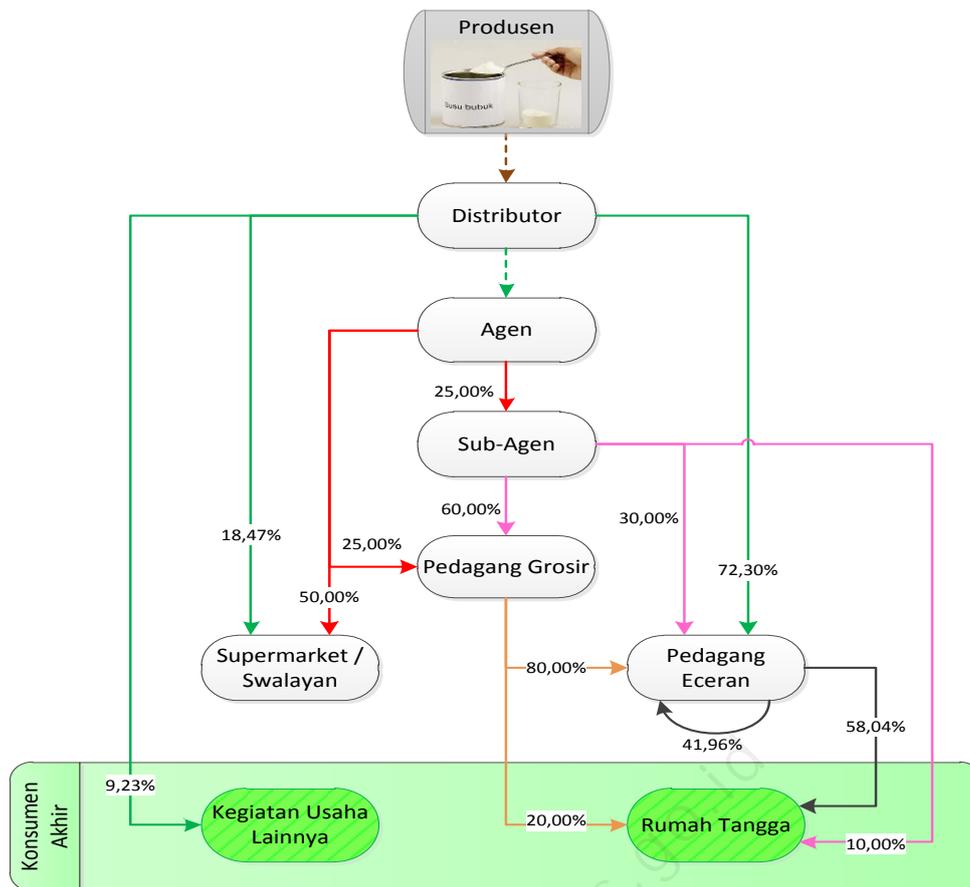
Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pemasok utama susu bubuk ke Provinsi Papua Barat adalah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Surabaya. Kedua wilayah tersebut memasok sebanyak 90,05 persen. Adapun pasokan yang berasal dari dalam provinsi adalah sebesar 9,95 persen. Seluruh pasokan tersebut kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam wilayah Provinsi Papua Barat sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Papua Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 67. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Papua Barat

2.4.33.2 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa beberapa fungsi usaha perdagangan yang terlibat dalam pendistribusian susu bubuk di Provinsi Papua Barat adalah distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan pengecer. Sementara distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen, pelaku usaha perdagangan lainnya saling berinteraksi untuk mendapatkan pasokan. Seperti agen yang mendapatkan pasokan dari distributor, sub agen dan pedagang grosir yang mendapatkan pasokan dari agen, dan pengecer yang mendapatkan pasokan dari distributor dan sub agen. Adapun mengenai penjualan, setiap fungsi perdagangan mendistribusikan komoditi ini ke pedagang lainnya dan juga ke konsumen akhir. Pembelian dan penjualan susu bubuk dari setiap fungsi perdagangan beserta besaran nilai persentasenya dapat dilihat pada pola distribusi perdagangan berikut.



Gambar 68. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Papua Barat

2.4.33.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Papua Barat sebagai berikut.

Tabel 2.34. Marjin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Papua Barat

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	1.065.923	227.006	751.329
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	924.140	216.680	658.843
Rata-rata MPP (000 Rp)	141.782	10.326	92.486
Rasio Marjin (%)	15,34	4,77	14,04

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp141,78 juta dengan rasio marjin sebesar 15,34 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 15,34 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar

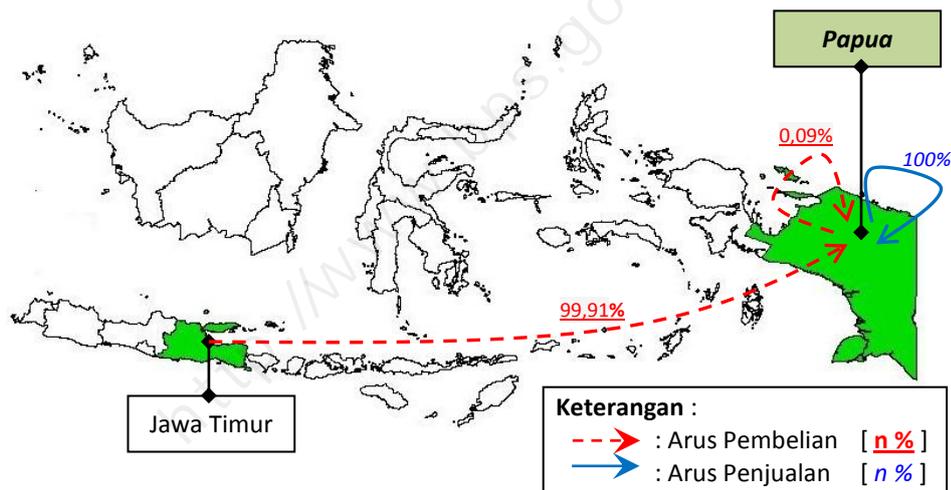
Rp10,33 juta dengan rasio margin sebesar 4,77 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 4,77 persen. Jika digabung, rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp92,49 juta dengan rasio margin sebesar 14,04 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 14,04 persen.

2.4.34 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditi susu bubuk meliputi Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura.

2.4.34.1 Peta Distribusi

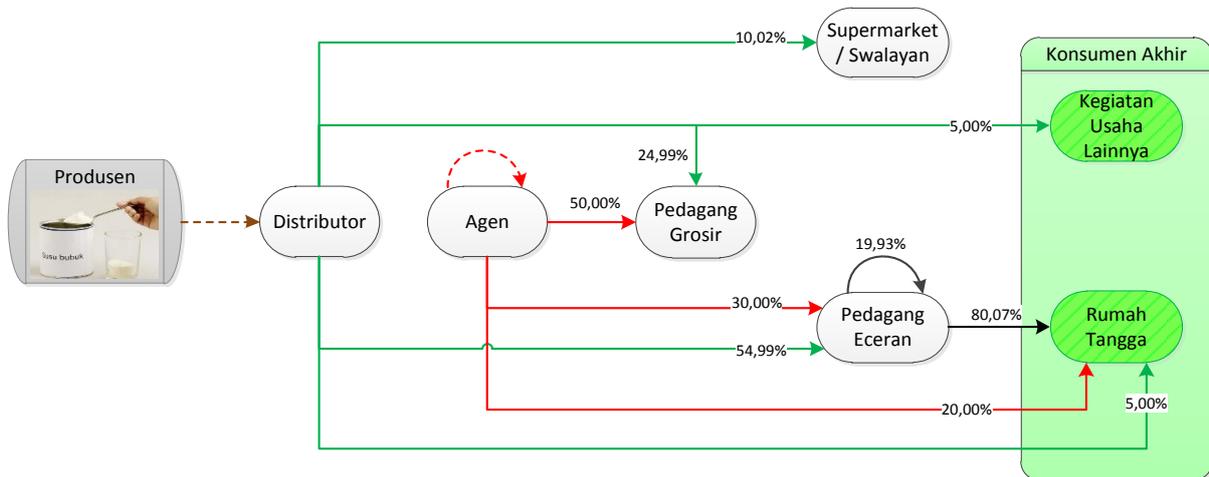
Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa sebanyak 99,91 persen pasokan komoditi susu di Provinsi Papua diperoleh dari Kota Surabaya. Sisanya dipenuhi oleh wilayah di dalam provinsi. Seluruh pasokan tersebut kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam Provinsi Papua sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditi susu bubuk di Provinsi Papua secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 69. Peta Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Papua

2.4.34.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan susu bubuk di Provinsi Papua melibatkan fungsi usaha distributor, sub agen, dan pedagang eceran. Sementara distributor mendapatkan pasokan langsung dari produsen, agen mendapatkan pasokan sesama agen. Sedangkan pedagang eceran mendapatkan pasokan dari beberapa fungsi usaha perdagangan lainnya seperti dari distributor, agen, dan sesama pedagang eceran lainnya. Ketiga pelaku usaha perdagangan tersebut kemudian memasarkan dan menjual pasokan ke fungsi usaha perdagangan lainnya dan juga langsung ke konsumen akhir. Penjualan dan pembelian susu bubuk dari setiap fungsi usaha perdagangan beserta besaran nilai persentasenya disajikan secara lengkap pada gambar di bawah ini:



Gambar 70. Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Provinsi Papua

2.4.34.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data marjin perdagangan dan pengangkutan di Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel 2.35. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Susu Bubuk di Provinsi Papua

Uraian	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB+PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (000 Rp)	6.084.264	48.663	2.312.014
Rata-rata Nilai Pembelian (000 Rp)	5.952.110	46.007	2.260.796
Rata-rata MPP (000 Rp)	132.154	2.656	51.218
Rasio Marjin (%)	2,22	5,77	2,27

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PB susu bubuk adalah sekitar Rp132,15 juta dengan rasio marjin sebesar 2,22 persen, artinya pedagang besar mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,22 persen. Rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk lembaga usaha yang termasuk kategori PE susu bubuk adalah sekitar Rp2,66 juta dengan rasio marjin sebesar 5,77 persen, artinya pedagang eceran mengambil keuntungan rata-rata sebesar 5,77 persen. Jika digabung, rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan untuk pedagang besar dan pedagang eceran adalah sekitar Rp51,22 juta dengan rasio marjin sebesar 2,27 persen, artinya pedagang susu bubuk mengambil keuntungan rata-rata sebesar 2,27 persen.

BAB III KESIMPULAN

Pada umumnya provinsi-provinsi di Indonesia mendapatkan pasokan susu bubuk dari wilayah di luar provinsi. Dua provinsi utama pemasok ketersediaan susu bubuk tersebut adalah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain memasok dari wilayah di luar provinsi, beberapa provinsi juga melakukan aktivitas ekspor impor susu bubuk. Provinsi yang mengekspor susu bubuk adalah Jawa Timur, sedangkan provinsi yang mengimpor susu bubuk adalah Kalimantan Utara.

Kegiatan distribusi komoditi di setiap provinsi melibatkan pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar tidak hanya mendistribusikan komoditi susu bubuk ke fungsi usaha perdagangan lainnya, tetapi juga mendistribusikan langsung ke konsumen akhir seperti industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Adapun perolehan rata-rata margin pedagang besar dan pedagang eceran tersebut masing-masing adalah sebesar 13,12 persen dan 10,74 persen.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

**VPDP-14
PEDAGANG**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT					
(1)	(2)				
1. Provinsi :	<table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr></table>				
2. Kabupaten/Kota*) :	<table border="1" style="width: 40px; height: 20px;"><tr><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 10px;"></td></tr></table>				
3. Kecamatan :	<table border="1" style="width: 60px; height: 20px;"><tr><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td></tr></table>				
4. Kelurahan/Desa*) :	<table border="1" style="width: 60px; height: 20px;"><tr><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td></tr></table>				
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="width: 80px; height: 20px;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>				
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :					
7. Alamat Perusahaan/Usaha :					
Kode pos : <table border="1" style="width: 60px; height: 20px;"><tr><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td><td style="width: 15px;"></td></tr></table>					
Nomor Telepon : (.....)	Ext: Nomor Fax. : (.....)				
E-mail:	Website:				

*) coret yang tidak sesuai

- Tujuan Survei** :
- Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi
 - Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan.
 - Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Informasi lebih lanjut hubungi:

Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Jl. Dr Sulomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id

atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:

BLOK II: KETERANGAN UMUM	
(Jenis komoditi yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS)	
(1)	(2)
1. Kegiatan utama perusahaan/usaha:	VDPD-14 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> *) diisi oleh pemeriksa
2. Komoditi yang diteliti: Minyak Goreng 1 Tepung Terigu 2 Garam Bata 3 Garam Halus 4 Susu Bubuk 5	<input type="checkbox"/>
Rincian 3 s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditi pada Rincian 2.	
3. Fungsi perusahaan/usaha dalam lembaga usaha perdagangan: Distributor 1 Pedagang pengumpul 6 Sub distributor 2 Eksportir 7 Agen 3 Importir 8 Sub agen 4 Pedagang eceran 9 Pedagang grosir 5	<input type="checkbox"/>

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2013:			
No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	
(1)	(2)	(3)	
a.	Impor langsung	a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Importir	b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produsen	c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor	d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Sub distributor	e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Agen	f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Sub agen	g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang grosir	h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang pengumpul	i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Pedagang eceran	j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Perorangan	k.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah			1 0 0 %
2. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2013:			
No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode*)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %
*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan			

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)

3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2013:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase
(1)	(2)	(3)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Ekspor tir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Sub agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang grosir	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang pengumpul	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<i>Department Store</i>	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Supermarket/swalayan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Pedagang eceran	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Industri pengolahan	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Kegiatan usaha lainnya	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
o.	Rumah tangga	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %

4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2013:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2013? <input type="checkbox"/>				
Ya	1	Tidak	2	→ ke rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Kelangkaan barang	1	Modal	16	<input type="checkbox"/>
Fluktuasi Harga	2	Lainnya	32	<input type="checkbox"/>
Transportasi	4	(tuliskan)		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama				
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2013? <input type="checkbox"/>				
Ya	1	Tidak	2	→ ke Blok V
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	<input type="checkbox"/>
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	<input type="checkbox"/>
Transportasi	4	(tuliskan)		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama				

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2013:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2012)
b. Pembelian
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain		
d. Hilang/rusak
e. Penjualan
f. Stok Akhir (sisa 2013)
<small>*)Satuan yang digunakan: kilogram, kwintal, ton</small>				
2. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2013? <input type="checkbox"/>				
Ya	1	Tidak	2	
b. Jika "Ya", berapa nilainya? Rp.				

BLOK VI: CATATAN	

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

**VPDP-14
PRODUSEN**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT	
(1)	(2)
1. Provinsi :	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*) :	<input type="text"/>
3. Kecamatan :	<input type="text"/>
4. Kelurahan/Desa*) :	<input type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<input type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :	
7. Alamat Perusahaan/Usaha :	
Kode pos : <input type="text"/>	
Nomor Telepon : (.....)	Ext:
Nomor Fax. : (.....)	
E-mail:	
Website:	

*) coref yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi. b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

Informasi lebih lanjut hubungi:	
Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri	
Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710	
Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id	
atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:	

BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI

1. Penjualan barang produksi selama tahun 2013:

No.	Tujuan penjualan barang produksi	Persentase
(1)	(2)	(3)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Eksporir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Agen	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang pengumpul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Department Store	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Supermarket/swalayan	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Industri pengolahan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Kegiatan usaha lainnya	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Rumah tangga	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %

2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2013:

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

	BADAN PUSAT STATISTIK		UNTUK PERUSAHAAN
	KABUPATEN/KOTA :		
SURAT TANDA TERIMA			
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 (VPDP14-PEDAGANG), 1 (satu) kuesioner VPDP14-PEDAGANG yang ditujukan kepada :			
1. Nama Perusahaan	:	_____	
2. Alamat	:	_____	
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
HP	:	_____	
3. Kegiatan Usaha	:	_____	
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :, 2014		
Identitas Petugas VPDP14		Yang Menerima,	
Nama :	_____	Nama :	_____
NIP :	_____	Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :			
BPS Kabupaten/Kota :	, Telepon :	
atau No. HP Petugas VPDP14 :			

	BADAN PUSAT STATISTIK		UNTUK PETUGAS
	KABUPATEN/KOTA :		
SURAT TANDA TERIMA			
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2014 (VPDP14-PEDAGANG), 1 (satu) kuesioner VPDP14-PEDAGANG yang ditujukan kepada :			
1. Nama Perusahaan	:	_____	
2. Alamat	:	_____	
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
HP	:	_____	
3. Kegiatan Usaha	:	_____	
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :, 2014		
Identitas Petugas VPDP14		Yang Menerima,	
Nama :	_____	Nama :	_____
NIP :	_____	Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke :			
BPS Kabupaten/Kota :	, Telepon :	
atau No. HP Petugas VPDP14 :			

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 – 4 Fax: 021-3857048

E-mail: bpsHQ@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>